

499/HD/90

PENGANTAR ETIKA



oleh

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Dra. Isnarmi

JURUSAN PENDIDIKAN MORAL PANCASILA

FPIPS IKIP

PADANG 1989

KATA PENGANTAR

Buku sederhana ini disusun, untuk membantu mahasiswa memahami pokok-pokok pikiran tentang etika. Etika adalah salah satu cabang filsafat yang aksiologis, dalam usaha manusia memecahkan persoalan-persoalan hidupnya. Lebih jauh lagi membantu mahasiswa secara ideal di luar kecakapan ilmiahnya, juga mempunyai pengetahuan, pemahaman sekaligus integritas moral.

Sebagai cabang filsafat, etika merupakan salah satu bahasan dalam mata kuliah Filsafat Pancasila, pada Jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang. Untuk saat sekarang, buku ini dimaksudkan untuk pemakaian dalam lingkungan sendiri. Dengan harapan semoga memberi manfaat kepada pembaca.

Pertama-tama syukur dan puji penulis pada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan buku ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih pada Bapak Drs. Zurmaini Yunus yang telah memberikan motivasi dan bimbingan. Akhirnya perlu diakui bahwa tulisan ini tidak semata-mata proses rasional, tetapi juga emosional. Karena itu penulis perlu menyampaikan salam hormat pada Ibu, dan terima kasih pada saudara-saudara dan teman-teman yang telah memberikan semangat pada penulis.

MUSEUM PERPUSTAKAAN TRIP PADANG

DITERIMA TEL

2 Mei 1990

SUMBER/HARGA

Hadiah

KOLEKSI

K1

No. INVENTARIS

499/Hol/90 - P. 10 (2)

KLASIFIKASI

170 ISN DAFTAR ISI P. 10

Kata Pengantar

i

Daftar isi

ii

I Pengertian Etika

1

II Tugas dan Manfaat Etika

7

III Obyek Etika

12

IV Hubungan Etika Dengan Ilmu-Ilmu Lain

17

V Faktor-faktor Penting Dalam Etika

- Kedudukan Norma Dalam Etika

21

- Manusia Memiliki Kehendak Bebas

38

- Kebebasan dan Kewajiban Moral

47

- Kebebasan Yang Bertanggungjawab ✓

53

- Kesadaran Moral (Hati Nurani)

55

VI Aliran-aliran Penting Dalam Etika

- Aliran Etika Naturalisme

63

- Aliran Etika Hedonisme

64

- Aliran Etika Eudemonisme

65

- Aliran Etika Utilisme

66

- Aliran Etika Idealisme

67

- Aliran Etika Vitalisme

68

Penutup

70

Daftar Bacaan

72

I. PENGERTIAN ETIKA

Untuk mempelajari ilmu filsafat secara sistematis dan mudah mengikuti persoalannya, orang membagi filsafat menurut soal-soal yang dihadapinya saja. Dengan ini pula terjadinya pembahagian sistematika dalam filsafat.

Sesuai dengan pola berfikir yang berbeda dari setiap ahli filsafat, maka terdapat pula berbagai macam pembahagian sistematika filsafat. Namun perlu kita sadari bahwa keanekaragaman pembahagian itu, tidak perlu menimbulkan penyimpulan bahwa dalam filsafat tidak ada sistematika yang baik dan teratur.

Filsuf yang pertama kali dianggap sebagai perumus pembahagian ilmu filsafat ialah Aristoteles. Akan tetapi Plato sebenarnya telah membedakan lapangan-lapangan filsafat kedalam tiga macam cabang yaitu:

1. Dialektika, yang mengandung persoalan idea-idea atau pengertian-pengertian umum.
2. Fisika, yang mengandung persoalan dunia materi.
3. Etika, yang mengandung persoalan baik dan buruk.

Aristoteles mengemukakan rumusan pembahagian filsafat secara lebih konkrit dan sistematis. Pembahagian

ini diakui orang dengan baik sepanjang sejarah. Meskipun filsafat di zaman modern sudah banyak berubah dan berkembang, namun sistematika dari Aristoteles masih terlihat pengaruhnya.

Filsafat oleh Aristoteles dibagi kedalam empat macam cabang yaitu:

1. Logika. Ilmu ini bagi Aristoteles dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat.
2. Filsafat teoritis. Dalam cabang ini tercakup tiga macam ilmu yaitu:
 - a. Ilmu Fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata.
 - b. Ilmu Matematika, mempersoalkan benda-benda alam dan kuantitasnya.
 - c. Ilmu Metafisika adalah berhubungan dengan hakekat segala sesuatu.
3. Filsafat Praktis. Dalam cabang ini tercakup pula tiga macam ilmu yaitu:
 - a. Ilmu Etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perorangan.
 - b. Ilmu Ekonomi, berkenaan dengan kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga.
 - c. Ilmu Politik yang berhubungan dengan kesusilaan dan kemakmuran dalam negara.
4. Filsafat Poetika (Kesenian).

Selain dari pembahagian di atas, pada abad modern ini orang membagi filsafat sebagai berikut:

1. Filsafat Teoritis.

- a. Logika
 - b. Metafisika (Ontologi).
 - c. Filsafat Alam (Kosmologi).
 - d. Filsafat tentang manusia (Anthropologi).
2. Filsafat Praktis
- a. Etika.
 - b. Filsafat Agama.
 - c. Filsafat Kebudayaan.

Dari pembahagian-pembahagian di atas kita melihat bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang menyangkut bidang filsafat praktis. Yang dibahas di sini adalah masalah-masalah kesusilaan atau persoalan-persoalan nilai baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Hasbullah Bakrie dalam bukunya Sistematika Filsafat menyimpulkan bahwa etika adalah merupakan tujuan filsafat. Secara lengkap ia mengungkapkan: "Ketiga macam cabang filsafat itu kalau kita sederhanakan dapat juga dianggap sebagai pendahuluan filsafat (logika), persoalan filsafat (metafisika) dan tujuan filsafat (etika)."

Perkataan etika berasal dari kata Yunani, ETHOS yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Selain dari itu juga diartikan dengan kebiasaan, adat istiadat dan kesuilaan. Etika menyangkut batas-batas kehidupan dan kegiatan manusia, mengatur kehidupan bersama manusia. Dari itu etika merupakan pengaturan bagi kehidupan manusia agar dapat hidup bersama secara baik, oleh karenanya etika inheren dengan sosial. Dalam pergaulan hidup harus ada anggapan tentang apa yang baik dan apa yang buruk,

agar tingkah laku dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia menjadi teratur.

Dalam bahasa latin etika disebut dengan MOS, jamaanya MORES yang berarti kebiasaan. Kata ini kemudian berkembang menjadi kata MORAL, namun berbeda pengertiannya dari etika. Yang terakhir lebih bersifat teori, artinya etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang baik dan buruk. Sedangkan moral lebih bersifat praktis karena ia menyatakan ukuran yang baik dan buruk tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu.

Istilah moral biasanya dipergunakan untuk memberikan penilaian atau predikat terhadap tingkah laku manusia. Karena itu untuk memahami pengertian moral sangat erat hubungannya dengan etika. Etika adalah suatu ilmu cabang filsafat yang mengkaji tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.

Dr. Frans Von Magnis mengatakan bahwa etika adalah penyelidikan filsafat tentang bidang yang mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu etika dapat didefinisikan sebagai filsafat tentang moral.

Menurut Drs. M. Said etika sebenarnya menyangkut bidang yang normatif, sebab etika hendak menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya perbuatan manusia? Prilaku mana yang baik dan yang buruk? Apakah tujuan manusia itu?

Lain halnya dengan Austin Fogthey dalam bukunya, *Right and Reason* memberikan batasan mengenai etika yang begitu luas. Dia mengemukakan bahwa etika berhubungan dengan ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik dan ilmu hukum. Etika berbeda dengan bidang-bidang tersebut dalam aspek tinjauannya dari segi keharusan. Etika juga harus dibedakan dari teologi moral, karena etika bukan bersandarkan pada kaidah-kaidah keagamaan, tetapi terbatas pada pengetahuan yang lahir dari manusia sendiri. Definisi ini memang sangat luas, namun kurang menunjukkan sifat dasar etika itu sendiri.

Frankena menjelaskan bahwa etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pemikiran kefilosofian tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral.

Dari berbagai macam definisi tentang etika, dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis definisi. Pertama definisi yang menekankan pada aspek historik. Dalam hal ini etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia. Kedua definisi yang menekankan secara deskriptif. Etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Dalam definisi ini tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologik. Ketiga adalah jenis definisi yang menekankan pada sifat dasar

etika sebagai ilmu yang normatif dan bercorak kefilosofan. Etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruk terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup memberikan informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Atas dasar jenis definisi ini etika digolongkan sebagai pembicaraan yang bersifat informatif, direktif dan reflektif. (A. Charis Zubair 1986:17).

II. TUGAS DAN MANFAAT ETIKA

Etika sangat penting dan bahagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan etika manusia menjadi berbeda dari makhluk hewani. Manusia tanpa etika akan hilang derajat dan martabat kemanusiannya. Pribadi seseorang tidak akan punya arti kalau sikap etis hilang dari dirinya.

Etika sebagai ilmu merupakan pemikiran tentang bagaimana mengambil keputusan. Sebuah pemikiran merupakan hasil usaha budi nurani manusia untuk dengan pikirannya mengerti, memahami dan menganalisa sebuah persoalan tentang cara mengambil sebuah keputusan. Di dalam etika ada unsur-unsur apriori dan ada aposteriori. Unsur-unsur itu membentuk prinsip dalam pemikiran yang jadi sebab penentuan kemauan dan perbuatan serta menentukan cara pengolahan isi etika.

Apabila kita renungkan ternyata hidup ini seolah-olah terentang dalam jaringan norma-norma yang berisi ketentuan-ketentuan, kewajiban dan larangan-larangan. terhadap norma-norma itu kita tidak dapat menolak apalagi menghindar. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan atas dasar apa sesungguhnya kita tunduk pada norma itu?

Bagaimana kita dapat menilai norma itu? Menurut Frans Von Magnis (1984:13) mencari jawaban atas pertanyaan itu adalah tugas etika.

Etika senantiasa mempertanyakan norma-norma yang berlaku; mempertanyakan dasar-dasar pembedaan berlakunya suatu norma. Norma yang tidak dapat dipertahankan terhadap pertanyaan kritis ini akan kehilangan haknya. Dalam hal ini nampaklah bahwa sifat dasar dari etika adalah kritis. Sidi Gazalba (1978:530) mengatakan etika sebagai ilmu bertugas melukiskan dan menyusun norma. Dalam tugas yang pertama etika bersifat teori, karena etika melukiskan atau mendeskripsikan apa yang dipandanginya tentang baik, buruk, wajib dan sebagainya. Deskripsi itu dibahas oleh etika secara kritis; ditimbang dan di-harganya serta disusun aturan-aturan atau norma-norma. Dalam tugas yang kedua ini etika bertumpu pada nilai-nilai dan bersifat praktis.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa etika merupakan ilmu pengetahuan yang normatif. Artinya etika menunjukkan kepada kita tentang kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Dengan belajar etika orang akan mengerti dalam batas-batas tertentu mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hal ini etika tidak lebih dari sekedar menawarkan kriteria-kriteria tentang yang baik atau yang buruk. Maka persoalan untuk menjadi baik atau tidak baik sebetulnya adalah persoalan manusia. Dengan kata lain untuk bisa menjadi baik, manusia dituntut mem-fungsikan potensi yang dimilikinya dalam memahami dan

mentaati norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku.

Dengan adanya kriteria tentang baik dan buruk, manusia ditantang untuk bersikap kritis dan rasional; mampu membentuk pendapatnya sendiri serta bertindak atas dasar tanggungjawab. Dengan ini etika membantu manusia untuk bersikap kritis dan rasional terhadap semua norma, dan juga membantu manusia menjadi otonom. Otonomi manusia terletak dalam kebebasan untuk mengabaikan norma, tetapi menunjukkan kemampuan pribadi untuk bertindak atas kehendak sendiri dengan memperhatikan norma-norma. Atas pertimbangan manusia sebelum bertindak dan adanya kriteria, manusia menjadi mampu mengambil keputusan dan bertindak dengan lebih peka, obyektif dan rasional.

Menurut Ahmad Amin dalam bukunya Etika (1983:6) bahwa etika bukan hanya mengetahui teori baik dan buruk tetapi juga mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan yang memberi faedah kepada sesama manusia. Walau demikian etika tidak selalu berhasil baik kalau tidak ditaati oleh kesucian manusia.

Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa etika membantu kita dalam memahami situasi dan kegiatan kita. Memahami berarti mengeti secara menyeluruh latar belakang suatu perbuatan; mengapa kita lakukan perbuatan itu, di mana dan dalam kondisi apa perbuatan itu dilakukan. Dengan itu kita mampu meletakkan secara tepat persoalannya. Sebagai filsafat etika menyelidiki dan menentukan segala sesuatu yang tercakup dalam ruang lingkup bahasannya.

Dengan hasil penyelidikan itu manusia dibantu oleh etika untuk mengerti mengapa dan atas dasar apa seharusnya suatu keputusan ditetapkan.

Dalam hubungannya dengan agama, etika adalah melanjutkan usaha yang dilakukan oleh agama. Agama menerangkan tentang kepercayaan dan keyakinan manusia dan etika melanjutkannya sampai kepada konsekwensinya dalam perbuatan dan cara hidup manusia atas keyakinan agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. J. Verkuyl dengan istilah credenda dan agenda. Agama merupakan credenda (apa yang dipercayai) dan etika adalah agenda (apa yang dilakukan).

Etika tidak dapat menjadikan semua manusia baik, tetapi dapat membuka mata manusia untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Karena prinsip dasar etika adalah mengetahui perbedaan yang baik dan yang buruk. (Harsya W. Bachtiar ed. 1980:21).

Etika tidak memberi keputusan dalam setiap situasi secara sama. Manusia adalah yang bertindak bukan etika. Dengan demikian etika tidak akan berguna bila manusia tidak berkehendak untuk memanfaatkannya. Sesuai dengan ungkapan Aristoteles " Apa yang berhubungan dengan keutamaan tidak cukup dengan diketahui apa keutamaan itu. Bahkan harus ditambah dengan melatih dan mengerjakannya atau mencari jalan untuk menjadikan kita orang-orang utama."

Menurut M. S. Sastrosupono (1983:22), bahwa di dalam berpikir etis ada tiga unsur yang harus diperhatikan-

kan. Pertama unsur nilai yang merupakan sesuatu yang penting, karena nilai merupakan tujuan atau sasaran. Kedua unsur norma yakni merupakan peraturan yang membatasi kebebasan manusia. Terakhir unsur situasi yaitu jaringan-jaringan hubungan antara orang-orang yang terlibat satu dengan yang lain dalam suatu kegiatan tertentu. Ikatan antara mereka selalu mengandung unsur-unsur moral.

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa betapa penting dan bermanfaat etika bagi manusia. Ilmu etika dapat membantu orang dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kaitannya dengan prilaku. Karena etika dapat menjelaskan kepada manusia sebab dan akibat untuk memilih perbuatan yang baik dan bermanfaat. Karena itu etika mampu mencegah kita secara kontiniu agar tidak terperosok mengikuti keinginan-keinginan belaka. Etika juga mendorong manusia untuk memilih sikap dan prilaku yang baik, sekaligus dengan memahami etika kita akan tepat dalam menilai prilaku-prilaku yang ada dalam masyarakat.

III. OBYEK ETIKA

Setiap cabang ilmu yang utuh haruslah mempunyai obyek (obyek material), dan obyek tersebut diteropong melalui aspek tertentu (obyek formal). Demikian pula halnya dengan ilmu etika yang menjadikan manusia sebagai obyek materialnya. Sedangkan obyek formalnya adalah tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja. (I.R Pujawiyatna 1984:15).

Manusia dinilai oleh manusia lain dari tindakan yang dilakukannya dengan sengaja. Dari penilaian itu lahirlah berbagai pernyataan tentang manusia seperti rajin, jahat, bertanggungjawab dan sebagainya. Kalau kita kelompokkan penilaian itu, maka ia akan berada dalam dua bentuk nilai yaitu baik dan buruk. Sehubungan dengan ini Frans Von Magnis (1985:15) menyatakan bahwa etika menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan moral, yang disebut dengan pernyataan moral. Pernyataan moral dibedakan atas dua bentuk yaitu pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia itu sendiri. Yang pertama adalah pernyataan tentang suatu tindakan tertentu apakah sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma moral. Pernyataan ini melahirkan ungkapan betul, salah dan wajib. Oleh sebab itu pernyataan ini disebut dengan

pernyataan kewajiban. Pernyataan tentang manusia artinya mengenai unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif-motif, maksud, watak dan sebagainya. Pernyataan ini merupakan penilaian terhadap orang lain mengenai unsur-unsur kepribadian yang melahirkan ungkapan baik, buruk, jahat, mengagumkan dan sebagainya. Pernyataan yang kedua ini disebut penilaian moral.

Dalam kenyataannya pembahasan terhadap penilaian moral mengandaikan analisa pernyataan kewajiban. Seseorang tidak dapat dikatakan atau dinilai sebagai baik, jahat, bertanggungjawab dan sebagainya, kecuali setelah diketahui tindakannya dalam hubungan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian etika pada hakekatnya adalah analisa pernyataan kewajiban atau obyek etika adalah pernyataan tentang tindakan manusia.

W. Puspoprojo (1986:6) menyebut etika dengan filsafat moral. Obyek material dari filsafat moral adalah perbuatan-perbuatan manusia yaitu perbuatan yang dikerjakan dengan sadar dan sukarela, atas perbuatan itu ia dianggap bertanggungjawab. Sedangkan obyek formalnya adalah perbuatan-perbuatan manusiawi itu dipandang dari aspek "ke-betul-an" dan "ke-salah-an".

Etika tidak dapat dipisahkan dari tindakan manusia dan norma-norma. Membicarakan tentang manusia dan norma akan berhubungan dengan pengkajian tentang Tuhan sebagai sumber norma, serta pengkajian tentang metafisika antropologi mengenai hakekat manusia. Oleh sebab itu dalam pembahasan etika akan terdapat persoalan-persoalan

yang berhubungan dengan pandangan tentang Tuhan dan pandangan tentang manusia.

Tindakan manusia yang dijadikan obyek etika adalah tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian tidak semua tindakan manusia dapat dikenai pertanggungjawaban. misalnya anak kecil yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain tidak mungkin dituntut pertanggungjawabannya; demikian pula halnya dengan orang yang sedang bermimpi dan melakukan tindakan yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain juga tidak dapat dikatakan bersalah.

Dari uraian di atas menimbulkan pertanyaan, tindakan yang bagaimanakah yang dapat disebut "tindakan" dalam kesusilaan atau etika? Menurut Sidi Gazalba tindakan yang dipandang mengandung nilai etis mensyaratkan adanya situasi yang memungkinkan pilihan (bukan karena dalam keadaan terpaksa) serta kemauan bebas, sehingga tindakan dilakukan dengan sengaja. (Sidi Gazalba 1978: 514). Seorang prajurit yang membunuh di medan perang tidak dikatakan melakukan kejahatan, karena ia dipaksa oleh situasi perang; demikian pula orang bermimpi yang melakukan tindakan sehingga orang lain menderita karenanya, juga tidak dipandang bersalah karena tindakannya bukan disengaja

Kesengajaan dan kebebasan merupakan dua hal yang mutlak ada dalam perilaku etis manusia. Kalau tidak ada kesengajaan maka pada prinsipnya tidak ada penilaian

baik dan buruk. Kesengajaan meminta adanya pilihan. Pilihan berarti adanya penentuan dari manusia sendiri untuk bertindak atau tidak bertindak. Penentuan manusia bagi tindakannya itu disebut kehendak atau kemauan bebas. Sehubungan dengan ini Louis Leaky (1984: 111) mengatakan bahwa manusia tidak dapat tidak berkehendak. Dia adalah makhluk yang secara esensial berkehendak. Tetapi dia mempunyai kemampuan menghendaki apa yang disukainya, memilih apa yang dikehendakinya.

Suatu tindakan atau prilaku yang dilakukan manusia mencakup segenap pernyataan atau ungkapan yang seluruhnya atau sebahagian terletak dalam kekuasaan orang yang bersangkutan. Artinya bukan hanya perbuatan-perbuatan melainkan juga kata-kata, ungkapan tertulis dan gerak-gerik. Segenap prilaku itu sesungguhnya merupakan hasil dari dorongan batin manusia, tepatnya motif manusia melakukan sesuatu.

Akan tetapi motif tidaklah berdiri sendiri. Selain bahwa manusia dalam bertindak laku tidak hanya dipengaruhi oleh satu motif, ia juga harus paham kriteria yang terkandung dalam perbuatannya. Dengan kata lain manusia dalam berbuat sesuatu yang baik, juga mengetahui apa yang baik. Dengan demikian obyek etika menunjuk kepada manusia sebagai suatu kebulatan. Tidak hanya motif serta kecendrungan batiniah tetapi juga tujuan-tujuan yang ditetapkannya, idaman-idaman yang hendak diujudkannya dan norma-norma yang mendasari prilakunya.

Dari uraian di atas tentang tingkah laku manusia, kita dapat melihat adanya unsur-unsur pokok dalam ber-tingkah laku seorang manusia. Unsur-unsur pokok itu adalah: Kehendak, manifestasi dari kehendak dan perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki. Manusia berbuat disebabkan adanya dorongan kehendak. Kehendak merupakan unsur yang menentukan arah pilihan dari kecendrungan hati. Karena ada kehendak dapat terjadi penilaian baik dan buruk terhadap tingkah laku manusia. I. R Pujawiyatna (1984:15) menyatakan kalau hendak diadakan penilaian etis haruslah ada kehendak yang dapat memilih. Kehendak untuk memilih menuntut cara-cara pelaksanaannya dalam perbuatan. Manifestasi dari kehendak berarti segala situasi dan kondisi atau keadaan yang menyertai perbuatan itu berlangsung. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia karena dorongan kehendak bukanlah perbuatan yang hampa, melainkan perbuatan yang disengaja, disadari dan mempunyai tujuan. Dengan demikian ketiga unsur pokok dari tingkah laku manusia itu merupakan hal yang fundamental dalam etika. Dalam buku ini masing-masing unsur itu akan diuraikan secara rinci.

KKJ
170
ISN
P-1

IV. HUBUNGAN ETIKA DENGAN ILMU-ILMU LAIN

Sebagai cabang filsafat etika merupakan tujuan filsafat, dan boleh dikatakan etika adalah mahkota dari pengkajian filsafat. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan karena etika dipelajari setelah pengkajian bidang-bidang lainnya dalam filsafat.

Studi tentang etika menyandarkan diri pada epistemologi (filsafat pengetahuan) mengenai bahwa manusia dapat mempunyai kepastian, bisa mencapai kebenaran; dengan memenuhi hukum-hukum logika manusia dapat membuat pemikiran dan menaraik kesimpulan yang benar. Karena itu menurut W. Puspoprojo (1986:13) salah satu postulat dalam sistem kesusilaan adalah kemungkinan untuk sampai kepada yang pasti.

Etika berbicara tentang kebaikan. Tuhan sebagai kebaikan yang tertinggi merupakan bahagian yang penting dalam pembahasan etika. Dalam hal ini etika bertumpu pada filsafat tentang Tuhan (theodecea). Selain dari itu kaitan etika dengan metafisika antropologi (hakekat manusia) juga sangat erat. Sebagaimana ungkapan W. J Aalders yang dikutip oleh W. Puspoprojo: "Jika manusia

tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ada tempat duduk bagi kesusilaan, bahkan tempat berdiripun tak ada baginya."

Dalam antropologi metafisika dikaji tentang hakikat manusia. Manusia harus berbuat menurut kodratnya sehingga kodratnya diperkembangkan sepenuhnya sampai tujuan terakhir. Manusia terus berubah dan berkembang dan berubah sesuai dengan kodratnya yang dinamis. Di dalam perubahannya itu manusia tetap sebagai manusia. Artinya disamping adanya perubahan, terdapat hal yang tetap ada sebelum dan sesudahnya yang mendasari perubahan itu.

Dalam manusia orang harus membedakan antara kodratnya yang selalu ada, selalu sama, selalu identik, dengan segi yang mengalami perubahan. Maka tuntutan etis dalam perilaku manusia juga menuntut perbedaan antara ukuran-ukuran moral yang berdasarkan kodrat yang tetap (metafisik) manusia dengan ukuran-ukuran yang berdasarkan pada hal-hal yang berubah. Dengan kata lain ada norma yang mengatasi ruang dan waktu serta keadaan, dan ada norma-norma yang terikat oleh waktu, keadaan dan tempat. Untuk itu antropologi metafisikalah yang membantu menentukan sejauh mana manusia itu selalu identik dan tidak berubah.

Selain berhubungan dengan cabang-cabang filsafat, etika juga mempunyai kaitan yang erat dengan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi budaya, psikologi, hukum, ilmu ekonomi, sosiologi dan sebagainya. Semua itu mempunyai obyek material yang sama namun berbeda dalam

titik pusat kajian atau aspek pandangannya (obyek formal).

HUBUNGAN ETIKA DENGAN SOSIOLOGI

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia. Manusia tidak hidup dengan baik kecuali bermasyarakat dan tetap menjadi anggota masyarakat. Keutamaan manusia tak dapat dikenali tanpa mengetahui kehidupan masyarakatnya. Masyarakat adalah lembaga yang menjadi obyek sosiologi. Sedangkan etika memastikan bagaimana manusia dan lembaga itu bertindak menurut hak dan kewajibannya.

Menurut M. Amin (1975:8), pokok kajian etika yang mempelajari tentang kelakuan manusia yang timbul dari kehendak, tidak bisa terlepas dari kajian kehidupan kemasyarakatan, yang jadi pokok persoalan sosiologi.

HUBUNGAN ETIKA DENGAN PSIKOLOGI

Psikologi dan etika membicarakan tingkah laku manusiawi, kemampuan dan perbuatan manusiawi. Psikologi mempelajari kekuatan perasaan, paham, ingatan dan kehendak manusia yang menyebabkan terjadinya perbuatan. Etika mempelajari bagaimana seharusnya atau sepantasnya seseorang bertingkah laku. Dari itu etika memerlukan kajian psikologi mengenai keterangan tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Dan untuk selanjutnya mempertanyakan bagaimana seharusnya dikerjakan. Demikian erat-nya kaitan etika dengan psikologi, sehingga tidaklah mengherankan kalau imam AL Gazali sebelum mengajar etika

terlebih dahulu ia menerangkan psikologi kepada siswa-siswanya. (Ismail Thaib 1984: 6)

HUBUNGAN ETIKA DENGAN ILMU HUKUM

Mempelajari hukum dekat hubungannya dengan etika. Keduanya sama-sama mempersoalkan norma; membicarakan keharusan; bertujuan mengatur perbuatan manusia untuk kebahagiaan mereka. Kajian kaidah-kaidah hukum dalam etika lebih luas dan dalam dari kajian tentang kaidah hukum dalam ilmu hukum. Yang terakhir bersangkutan dengan perbuatan lahiriah dan legalitas positif, sedangkan yang pertama berkaitan dengan perbuatan batin, kehendak dan hati nurani.

Filsafat hukum adalah merupakan perwujudan hubungan yang erat antara etika dengan ilmu hukum biasa. Kaitan lain yang tampak adalah dari segi norma hukum yang baik bersumber dari kaidah hukum dalam etika. Hal ini tampak dengan jelas dalam teori hukum kodrat oleh Thomas Aquinas. Menurutnya hukum kodrat bersumber dari hukum yang lebih tinggi yakni hukum abadi. Hukum kodrat menuntut agar manusia hidup sesuai dengan martabatnya. Karena itu hukum kodrat adalah dasar semua tuntutan moral. Prinsip ini diterapkan dengan tegas pada hukum buatan manusia. Isi hukum itu harus sesuai dengan hukum kodrat. (Dikutip dari Frans Magnis S 1986:5).

V. FAKTOR-FAKTOR PENTING DALAM ETIKA

KEDUDUKAN NORMA DALAM ETIKA

Kehidupan kita sebagai manusia berada dalam rentangan dan jaringan norma-norma. Semenjak kecil manusia telah belajar tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk dikerjakan. Semua ketentuan, keharusan dan larangan itu merupakan aturan bagi kelakuan manusia. Dan ia merupakan ukuran atau standar apakah tingkah laku kita dinilai baik atau buruk atau bahkan diwajibkan.

Setiap penilaian mengandaikan adanya norma. Norma mewajibkan manusia secara mutlak. Walau demikian kebebasan manusia tetap ada dalam mentaatinya. Pada hakikatnya norma memberikan dorongan kepada manusia untuk berbuat baik. Dengan kebebasannya manusia dapat saja menentang norma, tetapi ia tidak dapat lari dari rasa bersalah disebabkan ia tahu bahwa telah berbuat salah. Kita tidak dapat menghapus atau menghilangkan perbuatan salah yang telah dilakukan. Justru ini yang penting dan membuat tidak enak. Dengan demikian senantiasa memberi dorongan tersendiri bagi manusia untuk memilih perbuatan yang baik atau yang sesuai dengan norma.

Secara etimologis kata NORMA berasal dari kata

"NORMA" dalam bahasa Latin yang berarti penyiku; suatu perkakas yang dipergunakan oleh tukang kayu. Dari sini diperoleh arti kata "norma" sama dengan pedoman, ukuran atau aturan dan kebiasaan. Dengan demikian norma adalah ukuran, merupakan sesuatu yang dipakai untuk mengukur sesuatu yang lain.

Satu contoh mengenai fungsi penyiku bagi tukang kayu adalah dalam membuat sebuah meja. Sebuah penyiku dipasang untuk menetapkan bahwa sudut dari meja tersebut adalah benar sudut siku-siku. Dengan demikian seorang tukang kayu tidak bekerja secara serampangan. Setelah itu bagi orang lain yang ingin memperoleh kepastian dapat pula menggunakan penyiku untuk memeriksa sudut tersebut.

Dengan contoh di atas kita dapat menyimpulkan bahwa norma merupakan ukuran untuk mempertimbangkan atau menilai sesuatu. Tetapi juga merupakan haluan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Kedua macam fungsi tersebut saling berkaitan, walau mungkin saja salah satu diantara keduanya sangat menonjol. Bila suatu norma diterapkan terhadap obyek-obyek yang tidak dapat lagi diubah, maka fungsi norma di sini adalah sebagai ukuran saja. Apabila norma-norma itu kita terapkan terhadap prilaku manusia, maka masalahnya agak berbeda. Dapat juga terjadi dalam prilaku sesuatu yang tidak dapat lagi diulang dan diubah. Dalam hal ini kita hanya dapat menyatakan pertimbangan. Namun hasil pertimbangan ini memberi pengaruh terhadap prilaku di masa mendatang.

dan bahkan menimbulkan perubahan. Di sini fungsi norma merupakan haluan.

Norma berfungsi sebagai haluan apabila berhubungan dengan perilaku yang akan terjadi. Dalam hal ini norma bersifat pemandu, petunjuk, perintah atau hukum. Dengan kata lain norma memperoleh watak sebagai suruhan (imperatif). Sesudah perbuatan yang diperintah dilakukan, maka norma menjalani fungsinya yang kedua terhadap perbuatan tersebut.

Dalam buku Filsafat Moral oleh Puspoprojo dinyatakan bahwa norma adalah aturan, ukuran, standar. Norma adalah sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu yang lain. Dari itu timbul pertanyaan norma atau ukuran apakah yang dipakai untuk menyatakan suatu perilaku itu baik atau buruk?

Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu tahu terlebih dahulu dalam lapangan apa saja norma itu dipakai. Dalam hal ini Dr. H. D. Vos (1987:24) mengelompokkan norma atas kelompok norma mana suka dan kelompok norma tidak mana suka. Kelompok yang pertama ditetapkan oleh manusia sesuai dengan keinginannya. Artinya norma ditetapkan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, yang dipilih menurut kehendak manusia, contohnya aturan-aturan dalam suatu permainan. Tujuannya agar permainan dapat dilangsungkan secara baik. Dr. Frans Von Magnis (1984: 19) menyebut jenis norma ini dengan norma-norma teknis dan permainan, yang dibedakannya dari norma-norma yang berlaku umum. Kelompok norma yang kedua tidak ditetapkan

oleh manusia, melainkan dibebankan kepadanya, dikatakan juga bahwa norma ini berlaku baginya. Jenis norma ini dibedakan atas dua berdasarkan cara berlakunya, yaitu norma yang berlaku secara bersyarat dan norma yang berlaku mutlak. Yang termasuk norma yang berlaku mutlak adalah norma-norma kesusilaan, sedangkan norma yang berlaku secara bersyarat adalah semua norma yang harus diperhatikan apabila hendak mencapai sesuatu tujuan.

Kedua norma di atas dapat kita bedakan dengan melihat ciri-cirinya secara umum. Ciri pertama dari norma yang tidak bersyarat adalah wataknya sebagai suruhan. Norma ini berbeda dengan norma statistik atau norma-norma yang menyatakan keinginan, karena norma ini tidak menyatakan nilai rata-rata ataupun keinginan, tetapi mengungkapkan suatu perintah (suruhan) secara mutlak. Watak suruhan yang bersifat mutlak inilah yang membedakan secara nyata dari norma yang bersyarat.

Norma tidak bersyarat tidak diperoleh dari pengalaman. Seseorang mengerti arti suatu perintah moral seperti wajib mengasihi sesama manusia, bukan disebabkan pengalaman. Akan tetapi norma-norma ini berlaku bagi kenyataan.

Ciri lain dari norma tidak bersyarat ini adalah bersifat umum. Artinya bahwa norma itu tidak berlaku untuk seseorang saja, melainkan selalu untuk sejumlah atau bahkan semua orang. Apabila ada suatu ungkapan yang berhubungan dengan norma ini contohnya "jangan membunuh", maka sifat ungkapan itu bukanlah hanya untuk

orang yang mengungkapkan saja, tetapi juga memberikan perintah kepada orang yang diluar dirinya. Hal ini dapat kita hubungkan dengan pernyataan Hubbeling tentang ciri ungkapan kesusilaan, bahwa suatu ungkapan kesusilaan mempunyai ciri pengenal dengan mengandung pengiraan atau keinginan bahwa sesuatu ketentuan berlaku secara universal; sekurang-kurangnya pengiraan atau keinginan itu dipunyai oleh mereka yang menganut ketentuan tersebut, dan oleh mereka yang sedang melakukan tanggapan kesusilaan tersebut. (Soejono Soemargono ed. 1987:232).

Selain dari itu masih ada ciri lain dari norma yang sedang dibicarakan ini. Ciri ini berhubungan dengan pertanyaan "Dari manakah norma itu memperoleh wataknya yang mewajibkan?". Bisa saja dijawab bahwa watak tersebut diperoleh dari masyarakat dimana norma itu berfungsi. Namun masyarakat menyadari bahwa norma - itu ditetapkan bukanlah menuruti keinginan sendiri, tetapi suruhan itu juga dibebankan pada mereka. Apapun jawaban yang diberikan, mereka yang bersangkutan senantiasa menginsafi bahwa sumber norma-norma terdapat di luar orang seorang dan bahkan di luar masyarakat.

Di dalam etika, norma yang berlaku umum bagi setiap warga masyarakat dibedakan kepada tiga yaitu norma sopan santun, norma hukum dan norma moral. (Frans Von Magnis 1984:20).

Norma sopan santun dibedakan dari norma-norma moral karena berlaku berdasarkan suatu kebiasaan atau berdasarkan konvensi. Yang termasuk dalam kelompok ini

antara lain kebiasaan, langgam, adat istiadat, seperti kebiasaan makan, langgam pemakaman jenazah, aturan-aturan sopan santun serta adat istiadat perkawinan.

Antara kelompok norma sopan santun dengan norma moral terdapat kesesuaian satu sama lain. Keduanya berhubungan dengan dengan sejumlah norma yang bertujuan memberikan aturan kepada kehidupan alami. Secara demikian bermaksud memberikan arah serta isi ke dalam kehidupan manusia. Aturan-aturan ini berlaku dalam masyarakat yang lebih kecil sampai kepada masyarakat yang paling luas, diwariskan serta dipertahankan olehnya.

Di lain pihak terdapat perbedaan penting antara norma sopan santun dengan norma moral. Selain perbedaan yang telah dikemukakan di atas, juga berbeda dalam tingkatnya. Norma moral berada di atas norma sopan santun. Norma sopan santun tidak hanya ditetapkan serta berlaku menurut kebiasaan, tetapi juga dapat dipertimbangkan dan dinilai menurut ukuran kesusilaan (norma moral). Apa yang dipandang sopan dalam suatu masyarakat dapat dinilai salah menurut ukuran moral. Misalnya harakiri bagi orang Jepang mungkin dianggap sopan, sebagai pencerminan sikap tanggungjawab, namun belum tentu baik menurut ukuran kesusilaan. Karena itu norma sopan santun yang diinginkan adalah tidak bertentangan dengan norma moral. Menurut H. D Vos (1987:56) kelompok norma sopan santun terletak ditengah-tengah antara kehidupan yang belum direnungkan, yang langsung di satu pihak dengan kesusilaan di lain pihak. Berarti juga bahwa norma sopan santun merupakan

anak tangga bagi norma moral.

Perbedaan lain adalah norma moral mempunyai pengaruh yang lebih dalam terhadap manusia dibandingkan dengan norma sopan santun. Kedua-duanya memang menyangkut tingkah laku, tetapi masalah moral menyentuh lebih dalam serta mencapai lebih jauh dibanding pengaruh norma sopan santun. Norma moral pertama-tama diarahkan kepada kecenderungan batiniah, dan norma sopan santun lebih mengutamakan segi lahiriah. Perbuatan manusia sudah cukup dinilai sebagai baik apabila sudah pantas menurut ukuran sopan santun. Namun perilaku manusia dalam pandangan norma moral lebih ditentukan oleh motif-motifnya.

Ditinjau dari segi kewajaran (selfevidence), norma moral tidaklah bersifat wajar seperti halnya norma sopan santun. Yang terakhir dipakai karena dipandang sewajarnya dalam suatu kelompok masyarakat. Norma moral terjadi atas dasar perenungan dan kesadaran. Manusia yang bermoral menyadari mengapa ia melakukan perbuatan dan mempertimbangkan perbuatan yang ia lakukan; ia dapat mempertanggungjawabkan mengapa ia berbuat.

Fungsi norma dalam sopan santun adalah mengabdikan. Masyarakat memandangnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, sementara norma dalam kesusilaan bukanlah demikian. Pada hakikatnya masyarakat ada pertama-tama demi norma, yang pelaksanaannya menjadi tugas masyarakat. Karena itu norma moral tidak dipandang sebagai sarana mencapai tujuan. Kepatuhan terhadap norma sopan santun dapat membawa kehidupan yang dialaminya menjadi lebih

baik. Tetapi ketaatan terhadap norma moral kadang kala harus mengorbankan kehidupan alami, demi menyelamatkan kehidupan yang lebih hakiki. Tidak berlebihan kiranya ungkapan Schiller "Kehidupan bukanlah kebaikan yang tertinggi, kesesatan itulah merupakan keburukan terbesar."

Lapangan norma lain yang harus dibedakan dari norma moral adalah norma hukum. Pengertian hukum dapat dibedakan dalam arti sempit dengan hukum dalam arti luas. Dalam arti sempit yang dimaksud adalah hukum yang berasal dari negara dan alat kelengkapan negara. Sedangkan dalam arti luas mencakup hukum dalam persekutuan-perseutuan lain. Sesungguhnya antara kedua pengertian itu memperlihatkan kesamaan dalam banyak hal.

Dalam kebudayaan kita norma hukum semata-mata mengatur perilaku manusia yang satu terhadap yang lain. Hukum bersifat kemasyarakatan, karena hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Tujuan norma hukum adalah menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia. Untuk mencapai tujuan itu ditetapkan aturan-aturan yang mengambil bentuk perintah dan larangan, secara umum mengambil bentuk suruhan. Dalam konteks ini norma hukum bersamaan dengan norma moral.

Suatu norma hukum biasanya dikodifikasikan atau bersifat tertulis dan melembaga, artinya ada lembaga-lembaga tertentu yang memaklulkannya, menerapkannya sermenegakkannya. Pelanggaran terhadap norma hukum dikenai sanksi; suruhan-suruhan dalam norma hukum berlaku mutlak dan harus ditaati tanpa kecuali oleh masyarakat;

dengan demikian hukum bersifat umum, Akan tetapi norma moral mempunyai sifat keumuman yang berbeda dari norma hukum. Norma moral dapat mengamarkan terhadap hal-hal yang tidak dijangkau oleh norma hukum. Umpamanya mengenai hubungan antara orang tua dengan anak, terdapat berbagai aturan yang tidak terdapat dalam norma hukum. Oleh karena itu norma moral dapat memberikan lebih banyak amar dibanding dengan norma hukum.

Dalam kenyataannya norma hukum mempunyai penampilan yang lebih kokoh dan lebih terbebas dari sikap subyektif, dibanding norma moral. Walaupun demikian norma hukum tidak didasarkan atas kehendak semauanya. Suatu sistem hukum bukan hanya mungkin ada bila dikuasai oleh satu atau sejumlah pokok pikiran, melainkan pada umumnya ditentukan oleh norma-norma tertentu yang pada gilirannya didasarkan atas norma yang bersifat sangat umum. Di sini norma moral menempati kedudukan yang lebih dasar dari norma hukum. Bahkan menurut pendapat Thomas Aquinas bahwa suatu hukum yang bertentangan dengan norma moral kehilangan kekuatannya. (Dikutip oleh Frans Von Magnis 1984:21).

Norma hukum dan norma moral sama-sama mengatur perilaku manusia. Namun: jangkauan penglihatan norma hukum hanyalah tindakan lahiriah, sedangkan norma moral lebih memperhitungkan itikad budi, hati nurani dan keinsafan batin.(A. Ch. Zubair 1987:24).

Tidak ada unsur lahiriah dari suatu perbuatan yang memastikan bahwa itu adalah norma moral. Mungkin

saja, dalam suatu amar terkandung bermacam-macam norma. Demikian pula ciri khas dari norma moral tidak terletak dalam isi norma. Maka dari itu sifat moral dari norma terletak pada unsur dalam kesadaran kita yang menyertai ketaatan terhadap norma-norma. Sehubungan dengan ini legalisme di bidang moral untuk sebahagian besar berupa sikap sudah merasa puas apabila orang berbuat sesuai dengan norma. Sebaliknya moralisme dalam hukum terjadi apabila orang memberi arti yang besar kepada kecenderungan batiniah.

Kedua norma yang sedang dibicarakan ini sama-sama berhubungan dengan sanksi-sanksi. Tetapi sanksi-sanksi itu mempunyai sifat yang berbeda. Sebahagian besar hukum dapat dipaksakan berlakunya. Norma hukum mempunyai lembaga yang dapat melakukan pemaksaan untuk mentaati aturannya. Sedangkan norma moral tidak dapat dipaksakan berlakunya. Bahkan dipandang tidak bermoral apabila seseorang dipaksa dengan kekuasaan untuk berperilaku susila. Perbedaan sanksi antara kedua norma ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Suatu pelanggaran hukum yang mendapat hukuman berat dapat kita nilai kurang jahat dari segi norma moral. Sebaliknya pelanggaran hukum yang dianggap kecil tetapi sesungguhnya jahat secara moral. Umpamanya melakukan perampokan terhadap sebuah bank dapat dihukum berat secara hukum, tetapi sebetulnya lebih jahat dari segi moral tindakan mengganggu dan menyakitkan hati seorang tua yang telah renta.

Masih berhubungan dengan sanksi, maka perbedaan

norma hukum dan norma moral terletak pada dasar-dasar sanksi. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan bahkan negara. Di balik hukum berdiri pengaruh negara dan alat kekuasaan negara. Berbeda dengan norma moral yang dilatar belakangi semata-mata oleh kewibawaan norma-norma dan tidak mempunyai alat-alat kekuasaan. Menurut H. D. Vos (1987:67) bahwa pengutukan yang bersifat moral terhadap suatu perilaku didasarkan atas keabsahan norma moral yang mengandung watak adimanusiawi.

Akhirnya pembicaraan kita lebih dititik beratkan kepada norma moral. Dengan hanya norma sopan santun dan norma hukum, kita belum dapat menilai perilaku seseorang sehingga dikatakan baik atau buruk. Karena sifat kedua norma tersebut yang menekankan pada unsur lahiriah dan tidak berlaku universal. Maka norma moral melengkapi kekurangan yang terdapat pada kedua norma itu.

W. Puspoprojo (1986:102) mendefinisikan moralitas sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Moralitas dapat intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama memandang perbuatan manusia menurut hakekatnya bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif. Yang dipandang adalah: apakah perbuatan baik atau buruk pada hakikatnya; bukan apakah seseorang telah memerintahkannya atau melarangnya. Moralitas ekstrinsik moralitas yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh penguasa (hukum positif).

Sehubungan dengan pembahagian moralitas di atas terdapat berbagai pendapat yang berbeda dikalangan ahli-ahli etika. Di satu pihak adalah mereka yang berpendapat bahwa moralitas hanyalah ekstrinsik. Umpamanya para penganut aliran positivisme, memandang etika sebagai bagian Sosiologi yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi. Kebiasaan moral itu muncul dari kebiasaan sosial dan terus berubah bersama perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam masyarakat. Contoh lain seperti Thomas Hobbes dan J. J. Roussau, mengatakan bahwa moralitas bersumber pada negara atau masyarakat politik. Ada lagi pendapat lain yang menyatakan bila moralitas bukan hasil konvensi manusia, sumbernya harus terdapat pada Tuhan. Apapun pendapat di atas pertanyaan aslinya tetap sama yaitu; Apakah perbuatan baik itu karena perintah dan perbuatan buruk itu karena dilarang; atau perintah dan larangan itu karena perbuatan-perbuatan itu baik dan buruk menurut hakekatnya? Bila alternatif pertama yang dipilih maka tidak terdapat moralitas intrinsik. Namun dalam kenyataannya ada perbuatan-perbuatan yang sungguh mempunyai moralitas intrinsik. Artinya moralitas perbuatan-perbuatan itu didasarkan pada hakikat perbuatan-perbuatan itu sendiri.

Sehubungan dengan adanya moralitas intrinsik maka timbul pertanyaan: bagaimana menentukan hakikat perbuatan-perbuatan itu, sehingga diperoleh ukuran bagi suatu perbuatan-perbuatan?

Perbuatan-perbuatan manusia berhubungan dengan

tujuan, karena perbuatan merupakan sarana ke arah tujuan terakhir. Tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan sempurna. Keinginan manusia pada tujuan akhir tersebut, tersurat dan tersirat dalam hakekat manusia. Hal ini membawa kepada hubungan perbuatan dengan hakekat. Kebaikan atau keburukan perbuatan manusiawi dapat diketahui dengan menyelidiki hakekat manusia. Maka kesimpulannya adalah; Perbuatan-perbuatan manusiawi membimbing ke arah tujuan terakhir manusia, dan moral itu baik apabila sesuai dan serasi dengan hakekat manusia. Sebaliknya perbuatan dihukum buruk secara moral karena tidak sesuai dan serasi dengan hakekat manusia. Jadi, dalam konteks ini hakekat manusia adalah norma moralitas.

Memandang hakekat manusia haruslah memandang manusia dalam integritasnya. Sehubungan dengan ini W. Puspoprojo (1986:125) memberikan patokannya sebagai berikut:

Pertama, hakekat manusia haruslah diambil dengan seluruh bahagiannya. Artinya seluruh bagian esensial manusia baik metafisis maupun fisis. Juga semua bagian integral atau anggota badan dan perlengkapan yang terdapat pada setiap individu.

Menurut definisi klasik namun teruji kebenarannya, manusia adalah hewan yang berbudi (*animal rationale*). Manusia sebagai "hewan" mempunyai aksi-reaksi biologis yang sama dengan hewan. Dalam kehidupannya manusia harus hidup dalam "kehewanannya", yaitu ia wajib menjaga aspek biologisnya dan memenuhi kebutuhan biologisnya. Manusia tidak

boleh berambisi ingin hidup sebagai roh belaka, karena mencoba demikian adalah menyalahi kodratnya. Akan tetapi jika dipandang secara keseluruhan manusia tidak sama dengan hewan, melainkan manusia adalah "hewan yang berbudi". Karena itu ia harus juga hidup sebagai makhluk yang berakal budi. Akal budi manusia adalah suatu kemampuan memerintah, menggunakan pengendalian sadar atas lainnya.

Dengan demikian terdapat dua bahagian dalam diri manusia yaitu bahagian yang lebih rendah dan bahagian yang lebih tinggi atau aspek biologis dan aspek akal budi. Keduanya harus dipertahankan dalam keharmonisan. Kemampuan-kemampuan yang lebih rendah mengabdikan pada kemampuan yang lebih tinggi. Jika tidak, akan terjadi pembeontakan dalam kodrat manusia itu sendiri. Apabila akal budi diturunkan derajatnya, maka kehidupan yang berakal budi digantikan oleh kehidupan yang lebih rendah.

Kedua, hakikat manusia harus diambil dengan seluruh nisbahnya, seluruh kaitannya. Keselarasan dalam hidup manusia tidak hanya antar unsur-unsur yang membentuk manusia itu sendiri (keselarasan batin), tetapi juga keselarasan antara manusia dengan lingkungannya (keselarasan luar).

Manusia sebagai ciptaan Tuhan, tidak hanya sebagai makhluk individu yang berdiri sendiri tetapi juga makhluk yang harus berdampingan dengan sesamanya. Manusia adalah sebahagian ciptaan Tuhan. Ia harus menerapkan dirinya ke dalam rencana total dari penciptaan dan menduduki tempat yang ditentukan baginya menurut hakekat

kodrat yang ia terima. -

Hakekat kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan mempunyai hubungan dengan Tuhan; sebagai makhluk sosial berhubungan dengan sesama manusia; dan sebagai makhluk posesif berhubungan dengan benda-benda. Demikianlah tiga nisbah pokok yang terdapat dalam kodrat manusia. Untuk setiap nisbah manusia memiliki hakekat yang berbeda. Terhadap Tuhan adalah secara kodratiah manusia tergantung padanya. Untuk ini manusia berkewajiban menyembah dan taat. Manusia yang berkata bahwa secara mutlak tidak memerlukan Tuhan adalah menyalahi kodrat kemanusiannya. Terhadap manusia lain manusia adalah bersifat sosial. Dikatakan baik apabila berbuat yang menyebabkan lancarnya kehidupan sosial, dan adalah buruk apabila menghancurkan masyarakat manusia dan menghalangi kehidupan sosial. Adapun terhadap benda-benda, maka kodrat manusia adalah posesif. Artinya benda-benda itu dimiliki manusia. Benda-benda itu adalah bahagian dari ciptaan Tuhan, maka atas kehendak Tuhan manusia diberi rasa kesadaran ikut memiliki. Dalam hal ini manusia dipercayakan tugas dan tanggungjawab mengelola semua ciptaan yang tidak rasional.

Dari itu, perbuatan yang bermoral baik adalah jika pantas bagi manusia sebagai manusia. Manusia menjadi manusia dalam kesempurnaan hakekatnya sebagai "hewan yang berakal budi", sebagai makhluk ciptaan Tuhan; sebagai makhluk sosial; sebagai makhluk yang memiliki dan memelihara benda-benda. Suatu perbuatan adalah buruk

jika tidak pantas bagi manusia. Apabila ada pertentangan selera-selera budi dengan keinginan-keinginan hewani, maka budi harus menang. Jika terdapat pertentangan antara ketiga hakekat kodrat manusia, maka pengabdian kepada Tuhan yang diutamakan, kemudian kewajiban terhadap sesama dan terakhir adalah kodrat yang berhubungan dengan benda-benda. Hirarki yang demikian tersusun berdasarkan nilai intrinsik dan keagungan dari masing-masingnya.

Norma moral yang lahir dari kodrat manusia secara lengkap merupakan aturan bagi perbuatan manusia, Norma ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama, norma haruslah sedemikian rupa, sehingga darinya bisa ditarik aturan-aturan moralitas yang sama untuk semua manusia. Karena kodrat manusia adalah sama bagi semua manusia, maka aturan yang ditarik darinya diterapkan pada semua manusia.

Kedua, dari norma itu hendaklah dapat ditarik semua aturan moralitas. Jika tidak maka norma tidaklah lengkap. Dengan ini kita memandang kodrat manusia sepenuhnya dan lengkap dengan semua bahagian dan nisbahnya, karena realitas integral manusia mencakup segala sesuatu yang ada pertaliannya dengan suatu perbuatan manusiawi.

Ketiga, norma haruslah tidak dapat berubah, namun fleksibel untuk memungkinkan adanya penerapan sesuai dengan berbagai keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa kodrat manusia secara esensial tidak berubah.

Keempat, norma itu haruslah terus menerus hadir dan nampak bagi semua orang. Manusia dan perbuatan manusia senantiasa hadir bersama di setiap tempat dan saat. Untuk memastikan suatu perbuatan yang manusiawi, diperlukan norma moralitas yang dekat besertanya. Maka norma itu adalah yang lahir dari kodratnya.

Norma moral ini merupakan norma yang secara langsung dapat diterapkan pada perbuatan. Sebagai norma moral ia masih perlu jaminan keabsahan. Karena hakikat manusia bukanlah sesuatu yang terakhir. Norma tertinggi moralitas adalah hakikat ilahi. Di sinilah letak hubungan kesusilaan dengan pengkajian tentang eksistensi Tuhan. Jika tidak ada Tuhan, tidak terdapat yang baik yang tertinggi. Jika Tuhan tidak ada semua hal boleh dikerjakan. Tuhan selain pencipta manusia, juga merupakan tujuan akhir manusia, tujuan dari segala tujuan manusia. "Sebagaimana Tuhan adalah sumber dan norma dari segala sesuatu yang ada, demikian pula Tuhan adalah sumber dan norma segala kebaikan." (W. Puspoprojo 1986:134).

Sifat norma kesusilaan (moral) tidak dapat dilihat secara empirik, tidak dapat ditetapkan sebagai kesimpulan akal yang berdasarkan pengalaman. Norma moral tidak dipelajari dan dikenal melalui pengalaman dan pemikiran atau kedua-duanya. Realitas norma moral tidak dapat dicapai dengan alat pancaindera atau pemikiran. Pengetahuan tentang norma moral mempunyai corak yang khusus, meskipun tidak meninggalkan sama sekali pengalaman dan pemikiran. Penerimaan terhadap norma moral

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

berdasarkan kepada keyakinan dalam arti yang luas. Keyakinan selalu melibatkan seluruh totalitas manusia sebagai diri, maka pengetahuan tentang norma merupakan persoalan manusia sebagai manusia yang total.

Kemungkinan kebenaran yang terbuka atas dasar pengalaman dan pemikiran dapat kita jelaskan pada setiap orang. Tetapi keyakinan tidak demikian, ia senantiasa bersifat pribadi. Maka kesusilaan sangat terikat kepada pribadi orang dan tidak mudah dijelaskan kepada orang lain.

Metoda yang terbaik dalam kesusilaan adalah ketauladanan dalam bertingkah laku. Dengan demikian mengajak orang lain membuka diri untuk menerima kebenaran yang diyakini itu.

Kemungkinan masalah yang timbul adalah kesalahan dalam hal keyakinan manusia tentang norma tertentu. Motif yang bermacam-macam mempunyai pengaruh yang besar dan bahkan menentukan dalam proses terbentuknya keyakinan. Untuk ini kita harus meneliti motif-motif yang mendorong perbuatan kita. Maka di sini adalah persoalan logika, sebagaimana ditegaskan oleh I. R. Pujawiyatna (1984:80) "Apa keyakinan itu secara obyektif benar apa tidak, bukanlah soal etis, itu soal logis."

MANUSIA MEMILIKI KEHENDAK BEBAS

Etika mempunyai obyek yaitu perilaku manusia, atau perbuatan yang dilakukan secara sadar. Di sini terdapat

pula pengertian bahwa etika adalah sikap untuk memahami pilihan-pilihan yang seharusnya diambil di antara sekian banyak pilihan bertingkah laku.

Manusia menyatakan dan mempertimbangkan serta berkehendak dan memilih. Ia adalah makhluk yang secara esensial berkehendak. Selain dari itu ia mempunyai kemampuan menghendaki apa yang disukainya, memilih apa yang dikehendakinya.

Dr. Ahmad Amin (1975:46) mengemukakan bahwa suatu perbuatan yang lahir dari kehendak, di dalamnya terkandung beberapa hal yaitu:

1. Rasa (perasaan). Perasaan menjadi dasar bagi perbuatan. Kalau tidak ada rasa tidak berujud perbuatan.
2. Keinginan. Bertolak dari adanya perasaan timbul keinginan untuk mengisinya. Keinginan bukanlah kehendak, karena banyak keinginan tetapi tidak kehendak. Dan banyak terjadi beberapa keinginan yang berlawanan dengan kehendak yang hakiki. Maka hal ini membawa kepada unsur yang ketiga dalam perbuatan.
3. Keadaan mempertimbangkan, dalam rangka menetapkan satu pilihan yang dikehendaki.

Dalam mempertimbangkan, nampaklah bahwa sesungguhnya manusia bebas. Dia bebas untuk memilih atau menghendaki satu di antara sekian kemungkinan perbuatan yang akan dilakukan; dan mengarahkan ke arah mana kehendaknya disalurkan. Obyek kearah mana kehendak manusia itu cenderung, biasanya disebut tujuan. Ini senantiasa adalah suatu kebaikan (Louis Leahy 1981:112).

Manusia sebagai makhluk teleologis senantiasa meletakkan tujuan hidupnya adalah kebaikan. Karena itu manusia seharusnya cenderung kepada kebaikan. Kebaikan dapat berujud material, non material; riil atau semu. Setiap kebaikan memberi manfaat terhadap manusia sesuai dengan proporsinya, seperti kebaikan fisik adalah baik untuk manusia sebagai suatu organisme dalam kosmos.

Setiap tujuan mengandung nilai-nilai. Justru karena nilai-nilai itu manusia cenderung kepada tujuan. Nilai adalah sesuatu yang membangkitkan reaksi afektifitas manusia. Konsep manusia tentang nilai menerangi aspek hidup berkehendak dalam hidupnya.

Pengenalan manusia tentang nilai, sesungguhnya bukan merupakan unsur kehendak melainkan adalah kegiatan intelegensi. Oleh karena ada interaksi yang terus menerus antara intelegensi dan kehendak, maka manusia adalah makhluk yang bebas.

Kebebasan untuk memilih merupakan syarat mutlak di dalam etika. Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Petrsen (1976:93) bahwa "Etika itu sendiri adalah suatu perencanaan yang menyeluruh, yang mengaitkan daya kekuatan alam dan masyarakat dengan bidang tanggungjawab manusia", maka tanggungjawab hanya dapat dituntut apabila ada kebebasan untuk memilih.

Menurut Dr. Frans Von Magnis (1979:44), faham tentang kebebasan manusia dapat dibedakan atas paham negatif dan positif. Pada umumnya kata "kebebasan"

mengandung arti apabila kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak tidak dibatasi oleh suatu paksaan dari atau keterikatan kepada orang lain. Faham negatif dari kebebasan mengandung arti bebas dari apa, bukan bebas untuk apa. Seseorang disebut bebas apabila: dapat menentukan sendiri tujuan-tujuannya; dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya; tidak dipaksa (terikat) untuk membuat sesuatu yang tidak akan dipilihnya, atau dicegah dari berbuat apa yang dipilihnya sendiri oleh kehendak orang lain, negara atau kekuasaan apapun.

Kebebasan itu mengenai segala macam tindakan, artinya segala kegiatan manusia yang disadari, disengaja dan dilakukan demi suatu tujuan. Tidak dianggap membatasi kebebasan manusia, karena keterbatasan yang sudah merupakan kodratnya.

Faham positif kebebasan manusia adalah bebas tidak hanya dari sesuatu melainkan juga untuk sesuatu. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa kebebasan manusia terdiri dalam kemampuannya untuk menentukan dirinya ke arah kemanusiaan yang semakin bulat atau untuk memiliki diri sendiri. Faham ini dapat membantu untuk memperdalam pengertian tentang manusia. Tetapi sebagai titik tolak sangat meragukan. Berbeda dengan faham negatif, kata "bebas" di sini kehilangan arti empiris yang jelas. Justru yang bakal terjadi digunakan sebagai dalih membenaran pengekangan terhadap kebebasan. Karena faham ini membuka kesempatan segala macam pendapat yang

mengatas namakan "kebebasan yang sebenarnya:"

Sejalan dengan itu Louis Leahy (1981:116) berpendapat bahwa kata "kebebasan" berarti ketiadaan paksaan. Ada bermacam-macam paksaan dan kebebasan. Kebebasan fisik adalah ketiadaan paksaan fisik. Kebebasan dalam konteks ini mengandung arti tidak adanya paksaan terhadap kemungkinan-kemungkinan kita dalam bergerak secara fisik. Kebebasan moral adalah ketiadaan paksaan moral, hukum atau kewajiban. Dengan kata lain tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, larangan dan lain desakan. Kebebasan psikologis adalah ketiadaan paksaan psikologis. Suatu paksaan psikologis berupa kecendrungan-kecendrungan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau sebaliknya membuatnya tidak mungkin untuk melakukan beberapa kegiatan tertentu. Kebebasan psikologis disebut juga kebebasan untuk memilih, karena kebebasan inilah yang memungkinkan subyek untuk memilih antara berbagai tindakan yang mungkin. Dr. Frans Von Magnis (1979:47) menyebutnya dengan kebebasan kehendak yaitu kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Dengan demikian kebebasan psikologis merupakan kualitas kehendak; orang dapat berbuat dan tidak berbuat (kebebasan berbuat); atau berbuat dengan cara begini atau begitu (kebebasan spesifikasi).

Sebagaimana telah dibicarakan juga di atas, bahwa manusia dalam bertindak adalah melakukan sesuatu dengan sengaja dengan maksud dan tujuan tertentu. Kemampuan ini khusus manusiawi. Hewan juga dapat berbuat tetapi

berdasarkan dan didorong oleh naluri, perangsang dan kebiasaan, seperti percobaan yang dilakukan oleh Pavlov. Kebebasan mengandung kemampuan khusus manusiawi untuk bertindak, yaitu dengan menentukan sendiri apa yang hendak dilakukannya. Jadi, manusia bebas berarti manusia dapat menentukan sendiri tindakannya.

Manusia dalam bertindak dipengaruhi oleh lingkungan luar, dan sekaligus dapat mengambil sikap dan menentukan dirinya sendiri berdasarkan dorongan dari dalam. Akan tetapi manusia tidak begitu saja dicetak oleh dunia luar dan dorongan-dorongannya di dalam. Melainkan ia mampu membuat dirinya sendiri berhadapan dengan unsur-unsur luar dan dalam tersebut. Kemampuan itu yang sesungguhnya berujud kebebasan pada diri manusia. Dengan demikian kebebasan adalah merupakan indikator martabat manusia. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang tidak hanya ditentukan dan digerakkan tetapi juga dapat menentukan dunia dan dirinya sendiri. Apa saja yang dilakukan tidak atas kesadaran dan keputusannya sendiri dianggap sebagai hal yang tidak wajar.

Dalam setiap pilihan yang bebas kita dapat membedakan danya berbagai saat. Akan tetapi karena keputusan yang diambil begitu cepat, sehingga kita tidak menyadari adanya saat-saat itu. Apabila pilihan manusia benar-benar bebas, maka saat-saat tersebut selalu tampil.

Louis Leahy dalam bukunya Manusia Sebuah Misteri, mencoba mengidentifikasi saat-saat tersebut sebagai

berikut :

Pertama, saat itu terdiri dari semacam daya tarik yang dijalankan oleh suatu hal, baik atas kehendak atau atas kecendrungan lainnya. Pada saat ini manusia dihadapkan pada pilihan antara meneruskan perbuatan yang sebenarnya baik dan sedang dilakukan, atau meninggalkan perbuatan itu dan beralih pada perbuatan yang lebih menarik perhatian tetapi sekaligus bersifat jelek dari segi moral. Sebenarnya sebelum datang pilihan itu, bagaimanapun juga tidak ada kebebasan maupun pertanggungjawaban.

Kedua, saat ini adalah untuk memeriksa hal baik yang menarik perhatian. Meskipun kebaikan itu mengandung segi-segi yang menyenangkan, namun dia bukannya tanpa ketidak enakannya. Pada saat ini manusia mengerti adanya aspek-aspek positif dan negatif dari suatu perbuatan, untuk memperoleh arti dari sebuah kebaikan total. Andaikata manusia berbuat karena faktor tekanan kebaikan (aspek positif) yang intensif dari sesuatu perbuatan, maka sesungguhnya pada saat itu manusia tidaklah bebas. Justru adanya perbandingan dengan yang lain, manusia mampu menentukan pilihan di bawah kehendaknya yang bebas.

Ketiga, adalah saat mempertimbangkan. Artinya manusia membuat pertimbangan antara pro dan kontra terhadap suatu tindakan dengan intelegensinya. Dalam keadaan mana jiwa manusia berjuang mempertimbangkan keuntungan dari motif-motif yang akan dipilihnya. Akhirnya

kehendak akan memilih sisi dari motif yang bobotnya lebih berat.

Keempat. Cepat atau lambat manusia memutuskan: "Saya memilih kebaikan ini." Keputusan ini bukan merupakan hasil dari suatu aktivitas yang bersifat intelektual semata-mata, dan bukan pula hasil dari suatu situasi yang hanya obyektif belaka. Ini juga bukan hasil dari tekanan sosial atau pendidikan. Semua faktor itu memang mempengaruhi keputusan manusia tetapi tidak mendeterminasikannya. Penentuan akhir muncul dari intervensi "aku" yang paling dalam, di mana kemampuan spritual (inteligensi dan kehendak) menemukan sumber: ~~munya~~munya. Itulah suatu pilihan bebas.

Menurut I. R Pujawiyatna (1984:25), bahwa ada kehendak bebas pada manusia berarti manusia sendiri dapat menentukan tindakannya; ia dapat memilih. Hal ini tidak mengurangi sedikitpun adanya penentuan dan pembatasan manusia demi kodratnya. Juga tidak mengabaikan pembatasan adanya ketergantungan dari Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan tidak hilang karena ada kehendak bebas; keterbatasan yang ada pada manusia malah menunjukkan keistimewannya dari makhluk lain. Kemampuan manusia untuk memilih adalah kodrat manusia yang merupakan karunia dari Tuhan. Dengan kebebasan untuk memilih menjadikan pengabdian manusia pada Tuhan sungguh-sungguh sukarela. Justru dengan kehendak bebas itu pula manusia menjadi makhluk susila, dalam arti makhluk yang bertanggungjawab.

Di sisi lain tidak dapat diingkari bahwa ada kemungkinan hal-hal yang mengurangi atau bahkan menghalangi kebebasan kehendak seperti takut, bingung, kegelisahan, nafsu dan sebagainya; Atau halangan yang berupa ajakan, intimidasi dan paksaan. Tetapi sejauh ada unsur kesengajaan pada manusia, masih tetap ada pilihan bebas. Kesengajaan adalah mutlak dalam penilaian etis, dari itu segala sesuatunya yang dapat mempengaruhi kehendak dalam pilihannya harus diperhatikan.

Pengakuan terhadap kebebasan manusia, tidaklah mengatakan bahwa melakukan perbuatan dalam keadaan bebas, sama dengan melakukan perbuatan tanpa motivasi. Manusia yang berbuat secara bebas juga digerakkan oleh motif-motif. Bahkan motif-motif itu bersifat kesusilaan. Manusia dalam berbuat digerakkan oleh kepatuhan terhadap norma, bukan oleh kecenderungan kodrati atau keadaan kejiwaan yang berdasar atas kenyataan ragawi belaka. Memang kecenderungan itu tidak dapat dihilangkan. Bahkan jika terjadi dipandang menentang alam kodratnya sendiri. Kecenderungan ragawi manusia dapat dikendalikan, diatur dan diarahkan, untuk mencapai tujuan. Hal itu bisa terjadi dengan menepatkannya di bawah norma. Justru halnya manusialah yang dapat melakukannya, karena manusia mengenal norma dan dapat menampungnya sebagai motif dalam bertindak.

Kita menghadapi jenis kebebasan kehendak yang khas. Manusia hanya dikatakan bebas, bila ia dalam arti yang lebih tinggi terikat pada norma-norma. Apabila ia

tidak mengakui itu, maka ia tetap tidak bebas karena manusia akan dikuasai oleh kecenderungan -kecenderungan ragawinya. Dengan demikian ungkapan Goethe dan Jacques Perk yang dikutip oleh H. D Vos (1981:146) ada benarnya: "Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben." (Hanya hukum yang dapat memberi kebebasan kepada kita, dan kebebasan yang sejati memperhatikan hukum)

Berhadapan dengan norma, sebetulnya manusia tetap bebas untuk menerima atau meholaknya. Manusia dapat memutuskan untuk tunduk kepada norma atau melepaskan diri darinya, dan membiarkan dirinya dikuasai kecenderungan alami. Akhirnya persoalan yang timbul adalah: sejauhmana rasa kewajiban terhadap norma itu dikatakan membatasi kebebasan manusia.

KEBEBASAN DAN KEWAJIRAN MORAL

Dalam etika sering kali ditemui kata-kata "kewajiban" atau "mewajibkan". Dalam kata-kata itu terdapat kata "wajib". Immanuel Kant memandangnya sebagai pengertian yang pokok. Sebagai pengganti ungkapan "imperatif kategorik" dipakai pula ungkapan "amar tanpa syarat dari wajib". Justru dalam kata "wajib" terungkap secara jelas watak pengamaran tanpa syarat yang terkandung dalam norma-norma kesusilaan. Wajib seolah-olah dibebankan kepada kita, dan tidak dapat mengelak darinya. Bahkan De Genestet menyebutnya "Teman bertangan besi serta bermata amar yang dingin." Dalam pengertian wajib sering terlihat kesan seolah-olah adanya

ikatan atau paksaan. Namun masih perlu dipertanyakan kebenaran kesan itu.

Wajib adalah merupakan suatu unsur yang sangat fundamental dalam kesusilaan. Semua orang sudah biasa berhadapan dengan wajib. Akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa tiap-tiap orang sungguh-sungguh mengerti akan kedudukan wajib dalam kehidupan manusia.

Menurut N. Driyarkara (1978:20) wajib adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia. Carlule seorang ahli filsafat Inggris mengatakan bahwa rasa menunaikan wajib adalah bahagian dari tabiat kita yang menjadi pusat di dalam jiwa kita yang fana.

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu terlibat dengan kewajiban, misalnya seorang yang meminjam, merasakan adanya keharusan bahwa pinjaman itu harus dikembalikan. Seorang prajurit bertugas di daerah pertempuran, jauh dari keluarga dan diliputi rasa kesepian dan penuh bahaya maut. Andaikata dia melarikan diri, dia akan dicap pengecut, pengkhianat dan sebagainya. Dengan kata lain dia harus tetap berada di posnya. Semua contoh di atas memperlihatkan segi-segi wajib yang ada dan timbul dalam kehidupan manusia.

Kalaupun dalam pengertian wajib terkesan adanya ikatan, tetapi manusia justru memilih ikatan itu. Karena dengan melakukan itu manusia merasa mulia dan terlepas dari dosa. Dengan berusaha untuk melanggar kewajiban, yang dirasakan adalah makin terikat dan bahkan

merasa rendah dan hina. Jadi, pada hakekatnya semua manusia baik yang patuh atau sipelanggapun, merasakan keluhuran dan kewibawaan wajib itu.

Manusia merasa memenuhi harkat kemanusiaannya dengan mengerti dan mentaati kewajiban. Sebaliknya merasa menjatuhkan harkat kemanusiaan bila mencoba menentang dan mengingkarinya. N. Driyarkara menyebut wajib sebagai ikatan yang memerdekakan, ikatan yang membebaskan. Tidak mengherankan apabila Immanuel Kant filsuf Jerman yang terkenal, sangat memuja wajib, seperti yang diungkapkan dalam bukunya Kritik der Praktischen Vernunft:

"Wajib, O wajib namamu adalah sangat luhur, engkau tidak membujuk, melainkan menuntut ketaatan. Engkau tidak mengancam, tidak menakuti, melainkan menunjuk hukum. Hukummu masuk ke dalam batin dan menimbulkan rasa hormat...." (dikutip dari N. Driyarkara 1978:21).

Dalam menghadapi keharusan wajib manusia tetap bebas. Namun kebebasan bukan berarti boleh memilih sesukanya. Terhadap keharusan itu manusia tidak dapat menghindar. Tetapi kebebasan manusia terletak dalam menerima keharusan itu, apakah timbul dari kesadarannya atau bukan dari kesadarannya. Dengan merdeka dia harus menerima dan melakukan kewajiban yang timbul dari dalam.

Memang kadangkala ketaatan terhadap kewajiban moral dirasakan membelenggu manusia. Apabila manusia menyalahi kewajibannya, maka suara batin tidak henti-hentinya menegur. Suara batin itu disadari, tetapi dibenci bahkan ditolak atau tidak disetujui. Dr. Frans Von Magnis dalam bukunya Etika Umum menyebut kesadaran

seperti itu dengan "heteronom". Manusia dalam mentaati suara batin seolah mentaati sesuatu yang datang dari luar, yang sebetulnya tidak disetujui tetapi mau tidak mau harus diterima. Dalam hal ini perintah suara batin merupakan sesuatu yang mutlak, tetapi tidak diterima oleh rasionya. Perintah untuk mentaati kewajiban moral tidak disadari sebagai sesuatu yang sudah semestinya pada setiap orang. Apalagi tidak dirasakan sebagai sesuatu yang bernilai bagi dirinya sendiri. Kesadaran moral heteronom menunjukkan bahwa orang menolak kewajiban moralnya.

Jelas sekali, kesadaran moral heteronom merendahkan martabat manusia. Ia tidak hanya menghalangi kebebasan manusia tetapi bahkan menjadikan manusia terikat. Dari itu, ketaatan heteronom merupakan sikap moral yang tidak pantas.

Dalam kesadaran moral yang berkembang penuh (dewasa), orang melakukan kewajiban karena ia sendiri menyetujuinya. Sekalipun melakukan kewajiban itu meminta pengorbanan dari dirinya. Manusia menyetujui kewajibannya karena menyadari bahwa itu baik, berguna dan bernilai bagi dirinya. Kesadaran moral ini disebut juga kesadaran moral otonom. Melaksanakan kewajiban dengan kesadaran moral otonom adalah sesuatu yang luhur dan mengangkat martabat manusia.

Immanuel Kant mengatakan bahwa dalam mentaati hukum (kewajiban) moral, kita sesungguhnya mentaati diri sendiri. Kesadaran moral yang sebenarnya adalah

kesadaran otonom; orang tidak tunduk secara buta kepada suatu keharusan, melainkan ia melakukan apa yang sebenarnya disetujui atau dikehendaki sendiri. (Dikutip dari Frans Von Magnis 1984:55).

Kesadaran moral otonom merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri. Sidi Gazalba (1978:518) menyebutnya "kewajiban dilakukan karena hati." Seseorang melakukan kewajiban karena hati tidak mempertimbangkan imbalan-imbalan tertentu, melainkan karena kewajiban itu sendiri. Artinya disadari sebagai hal yang sudah alami (kodratnya). Walaupun seseorang karena melakukan kewajiban itu memperoleh imbalan-imbalan tertentu, seperti pujian, penghargaan, materi dan sebagainya. Namun semua imbalan itu bukanlah tujuan. Kalau kita kaitkan dengan ajaran agama maka perbuatan seperti itu disebut ikhlas; semata-mata patuh karena perintah Tuhan bukan karena sebab-sebab lain.

Mentaati kewajiban moral secara otonom, sedikit-pun tidak merendahkan manusia. Bahkan berhadapan dengan kewajiban moral, manusia dapat menghayati kebebasannya dengan sepenuhnya. Kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kalau orang berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan pilihan yang tidak mengandung unsur moral (wajib, harus, dilarang), maka penentuan diri dalam memilih hampir tidak mendapat tantangan. Dengan kata lain tanpa kewajiban moral, hampir selalu berarti bahwa tidak perlu suatu keputusan yang berat. Adalah kenyataan, semakin tinggi tuntutan

kewajiban moral serta besar kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak dalam wilayah tanggungjawab moral, maka tindakan yang dipilih atas dasar kehendak bebas manusia, menentukan nilai manusia itu sendiri. Karena dalam situasi yang demikian, manusia harus menentukan sikap dalam mentaati kewajiban moralnya. Kemampuan untuk menentukan diri kita sendiri terlaksana secara paling luhur, dalam sikap moral yang otonom.

Masih ada unsur yang harus diperhatikan. Penentuan manusia atas dirinya sendiri tidak bersifat definitif. Ada kemungkinan keputusan itu bersifat dangkal, dan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Justru di sinilah persoalan terakhir, tergantung pada manusianya. Seogianyalah manusia belajar menjalankan kewajibannya dengan senang hati serta berdasar keagendungan. Artinya menjalankan keharusan wajib dengan perasaan cinta dan suka. Situasi belajar dapat terbentuk dalam diri manusia secara berangsur-angsur. Dengan memulai kesadaran otonom dalam dirinya, lama kelamaan setiap keputusan yang diambil, akan membentuk kecenderungan dasar dalam diri manusia kearah yang baik. Aristoteles menyebut kecenderungan itu dengan "keutamaan".

Kewajiban pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang menakutkan. Selama kewajiban itu disadari sebagai hal yang luhur, mulia dan ditaati dengan hati yang ikhlas. Menurut N. Driyarkara (1978:28) "Wajib itu pada dasarnya adalah kebaikan, yang dengan keharusan dibebankan kepada kehendak kita yang merdeka untuk dilaksanakan."

Kebaikan itu tidak dapat disangkal karena merupakan kodrat kita."

KEBEBASAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

Kebebasan kehendak manusia benar-benar ditantang dan berkembang, karena berhadapan dengan kewajiban moral. Dengan adanya kewajiban moral maka kebebasan manusia betul-betul menentuka harkat manusia. Kewajiban itu menantang manusia untuk berbuat dan berani mengatasi kekhawatiran karena kepentingan pribadi. Untuk selanjutnya mencapai sesuatu yang baik dan bernilai. Melakukan kewajiban itu tidak demi melakukan sesuatu yang asal diwajibkan. Melainkan untuk mencapai kebaikan yang mau dijamin oleh kewajiban itu. Inilah sikap moral yang berkembang penuh, artinya sikap moral yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab dapat berarti berusaha mencapai yang baik dan bernilai bagi dirinya sendiri; memperhatikan kebutuhan orang lain; bersedia berbuat untuk kebaikan hidup manusia.

Tanggungjawab adalah kodrat manusia. Tanggungjawab merupakan salah satu aspek dari sikap dasar yang harus dimiliki manusia. Pemilikan itu mutlak agar manusia dapat memenuhi tuntutan kewajiban secara kodratiah.

Tanggungjawab hanya ada pada manusia, karena manusia mampu untuk mengerti perbuatannya. Bertanggungjawab berarti orang mengerti perbuatannya. Dalam pengalaman ini manusia memahami apakah perbuatannya wajar atau tidak, boleh atau dilarang. Bahkan manusia juga

sadar apakah perbuatannya sesuai atau tidak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

N. Driyarkara (1978:30) merumuskan tanggungjawab adalah "Kewajiban menanggung bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang adalah sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Berani bertanggungjawab adalah keberanian menentukan, memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan kodrat manusia; dan bahwa hanya karena tuntutan kodratlah perbuatan itu dilakukan.

Kebebasan manusia dan tanggungjawab mempunyai hubungan yang erat. Tidak mungkin ada tanggungjawab tanpa ada kebebasan kehendak. Dalam sikap bertanggungjawab, kebebasan mencapai pelaksanaan yang menyeluruh. Kesadaran akan tanggungjawab menunjukkan kesadaran kita akan arti kebebasan.

Apabila kita berhadapan dengan perbuatan baik yang harus dilakukan, kita mengerti bahwa berbuat adalah satu-satunya jalan untuk setia pada tuntutan kodrat. Sikap tanggungjawab adalah pendirian yang menyebabkan kita sanggup mempergunakan kebebasan hanya untuk melakukan kebaikan. Dengan bertanggungjawab berarti kita dengan bebas menerima keniscayaan kodrat. Kodrat rohani menuntut kita harus hidup susila. Untuk itu kita harus mau dan menghendaki kesusilaan.

Bebas dan bertanggungjawab artinya tidak melakukan sesuatu karena dipaksakan dari luar. Tetapi merasa bertanggungjawab atas apa saja karena tuntutan kodrat kesusilaan.

Dalam pengertian kebebasan terkandung kemampuan untuk bertanggungjawab (A. Ch. Zubair 1987:44). Mengurangi kebebasan adalah juga mengurangi tanggungjawab. Tanggungjawab yang sebenarnya mengandaikan kebebasan. Oleh karena itu pendidikan tidak mengandung perintah/larangan dan ancaman belaka. Yang terpenting adalah membuka kesadaran orang yang dididik terhadap apa yang baik dan bernilai; membuka pikirannya mengapa sesuatu boleh atau tidak boleh. Dalam hal ini yang harus diberikan adalah kemungkinan untuk mengembangkan kebebasannya secara bertanggungjawab. Dari itu pembentukan tanggungjawab tidak terlepas dari pembentukan kesadaran dalam diri manusia.

KESADARAN MORAL (HATI NURANI)

Jika dipandang dari sudut kesusilaan, kesadaran moral dan pendirian manusia atas kesadaran itu, adalah dasar yang menentukan corak hidup manusia. Kesadaran itu adalah seperti panggilan yang timbul dari aku, tetapi mengatasi diriku, demikian kata N. Driyarkara.

Kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral. Kesadaran itu didasarkan atas nilai-nilai yang esensial dan fundamental. Prilaku manusia atas kesadaran moral selalu direalisasikan menurut yang seharusnya, kapan dan di mana saja. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, tindakan yang bermoral akan selalu dilakukan. Melakukan perbuatan karena "kekuasaan" kesadaran itu sendiri.

Hidup susila dan tiap-tiap perbuatan susila adalah jawaban yang tepat terhadap kesadaran moral. Sebaliknya hidup yang tidak susila dan pelanggaran terhadap kesusilaan adalah menentang kesadaran tersebut. Dengan demikian kesadaran moral adalah kesadaran tentang diri kita sendiri sebagai berhadapan dengan baik dan buruk.

Dengan kesadaran moral manusia membedakan antara yang hak dengan yang bathil; halal dan haram; wajib atau terlarang. Meskipun manusia dapat melakukan salah satunya. Dalam hal ini terlihat sesuatu yang spesifik manusiawi. Dalam moralitas terkandung segenap aspek kemanusiaan, karena moralitas bukan suatu hal yang kebetulan, tapi soal kesengajaan; soal ada-tidaknya persetujuan kehendak (W. Puspoprojo 1986:146).

Dalam perkembangan hidup manusia, kesadaran moral tidak tumbuh bersamaan dengan lahirnya manusia itu. Pada saat manusia dapat berfikir dan berkehendak sendiri, ia memasuki taraf awal dari dunia moral dalam hidupnya. Dalam perkembangan normal taraf awal itu akan menuju taraf kesadaran moral yang sesungguhnya. Dalam hidup seseorang timbulnya kesadaran itu adalah peristiwa yang penting. Untuk pertama kalinya ia berhadapan dengan sesuatu norma yang mengikat secara mutlak. Dengan kata lain ia menyadari arti "wajib" dalam hidupnya. Bagaimanapun juga manusia mengalami dan merasakan keyakinan yang sangat konkrit "harus" dilakukan atau sama sekali "tidak boleh" dilakukan. Di sini "wajib" menampakkan diri secara mutlak.

Dalam pertemuan dengan wajib itu terdapat sesuatu yang hakiki. Manusia mengerti bahwa ia harus taat. Dengan taat manusia mengisikan suatu kebahagiaan dalam dirinya, karena dia telah memilih sesuatu yang baik sebagai manusia (dalam arti susila).

Dalam menghadapi kasus-kasus moral, seseorang akan berada dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu menyangkut keputusan melakukan atau tidak melakukan suatu hukum moral. Misalnya kita menerima kembalian uang belanja yang berlebih dari seharusnya dari seorang pedagang kecil. Di sini timbul dialog batin, di satu pihak mendesak untuk mengembalikan kelebihan uang itu, di lain pihak tetap menyimpannya atau memanfaatkannya. Dengan kesadaran moral yang penuh, terlihat hasil keputusan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Merasa wajib untuk mengembalikan uang tersebut.
2. Kesadaran akan wajib itu, sesuatu yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar.
3. Kewajiban itu bukan atas ketentuan pribadi, tetapi sesuatu yang obyektif. Artinya kewajiban yang memang sudah seharusnya begitu, dan berlaku bagi semua orang.
4. Kewajiban itu disadari sebagai sesuatu yang masuk akal.
5. Menyadari bahwa melakukan kewajiban berarti memenuhi hak orang lain. Hal ini merupakan sesuatu yang bernilai.
6. Tidak ada keadaan lain yang dapat merubah keyakinan

terhadap kesadaran, kecuali pendapat yang mempunyai alasan yang kuat.

7. Keputusan yang diambil adalah keputusan atas sikap pribadi yang bersangkutan. Berarti juga atas tanggungjawabnya sendiri, karena keputusan itu menentukan nilai dirinya. (Dr. F. V. Magnis 1984:24).

Dari unsur-unsur yang diuraikan di atas dapat kita simpulkan bahwa kesadaran moral bersifat mutlak, rasional dan bebas. Hal yang prinsip dalam kesadaran moral adalah keinsafan bahwa seseorang berada di bawah kewajiban moral untuk melakukan sesuatu. Kesadaran moral-bukan merupakan keputusan dari perasaan, melainkan pada hakekatnya adalah pernyataan. Di sinilah letaknya rasionalita kesadaran moral.

Dapat kita buktikan bahwa keputusan moral yang diambil oleh seseorang, pada dasarnya melalui proses sylogistik. Di mana premis mayoritas diambil dari prinsip moral yang umum (lih. W. Puspoprojo 1985:154).

contoh:

"Semua perbuatan dusta tidak dibolehkan
Hakekat perbuatan saya ini adalah berdusta
jadi hakekat perbuatan saya ini tidak diperbolehkan."
lehan."

Akan tetapi kesimpulan itu berlangsung dalam proses yang sangat cepat, sehingga tidak dirasakan sebagai hal yang bisa dinalarkan.

Dalam bentuk konkrit, kesadaran moral disebut

juga suara batin (hati nurani). Dalam bahasa asing disebut dengan istilah conscience, gewissen, geweten.

Conscentia (latin) merupakan terjemahan dari Suneidesis (yunani) yang artinya "sama-sama mengetahui". Kata yang terakhir ditujukan pada perbuatan sendiri, sehingga dapat diterjemahkan dengan "sadar akan perbuatannya sendiri (A. Ch. Zubair 1987:52).

Hati nurani kadang-kadang disebut suara Tuhan. Tetapi istilah tersebut harus diterima secara metaforis bukan harfiah. Bukan berarti setiap kita mendapat wahyu khusus dari Tuhan tentang setiap perbuatan yang akan diperbuat. Tuhan berbicara melalui kodrat manusia yang biasa dan melalui kemampuan-kemampuan biasa dari kodrat tersebut. Hati nurani bukanlah suatu kemampuan khusus yang berbeda dari intelek. Ia adalah intelek itu sendiri dalam fungsi istimewa dan praktis, yakni memutuskan kebenaran dan kesalahan perbuatan-perbuatan individual manusia.

Persoalan benar dan salah yang dipertanyakan oleh hati nurani bukan dalam arti yang teoritis. Tetapi merupakan pertanyaan-pertanyaan praktis seperti: "Apa yang wajib saya kerjakan dalam situasi konkrit ini?" "Bila saya kerjakan perbuatan ini, berdustakah saya?"

Keputusan yang diambil oleh hati nurani dapat juga keliru. Sebagaimana orang juga bisa membuat kesalahan dalam bidang hidup lainnya. Kekeliruan hati nurani terletak di mana keputusannya tidak sesuai dengan ukuran

baik buruk yang obyektif.

Sesungguhnya hal yang diacu oleh kata "hati nurani" ialah gejala pertimbangan terhadap diri sendiri yang bersifat kesusilaan (H. D. Vos 1987:129). Dalam peristiwa ini ia merupakan subyek dan obyek pertimbangan. Ini berarti dalam pertimbangan terhadap dirinya sendiri, bukan hanya mempunyai kesadaran, tetapi juga kesadaran diri. Manusia tahu tentang adanya sesuatu dalam dirinya yang turut mengetahui, suatu *consentia*, juga dalam hal kesusilaan. Itulah yang menyebabkannya dapat mempertimbangkan diri sendiri.

N. Driyarkara menyebut hati nurani dengan suara batin. Dari batin itu seakan-akan terdengar seruan dan memaksa untuk didengarkan. Kesadaran moral dalam bentuk suara batin bukanlah hanya rasa. Suara itu adalah pengertian yang dalam. Pengertian tentang baik dan buruk yang menyangkut seluruh pribadi manusia.

Hati nurani dapat merupakan penuntun bagi perbuatan-perbuatan yang akan datang; mendorong manusia untuk mengerjakannya atau menghindarinya; merupakan hakim atas perbuatan-perbuatan kita yang telah lalu; sumber pembedaan diri atau sumber rasa sesal kita. Hati nurani yang seksama adalah hati nurani yang memutuskan sebagai baik hal yang benar-benar baik; atau memutuskan sebagai buruk hal yang benar-benar buruk.

W. Puspoprojo (1986:234) mengemukakan dua aturan pokok dalam keharusan mematuhi perintah hati nurani :

- a. Selalu patuhilah hati nurani yang pasti.
- b. Jangan pernah berbuat dengan hati nurani yang penuh keraguan.

Hati nurani yang pasti dan seksama adalah sekedar hukum kodrat yang diumumkan pada individu dan diterapkan pada perbuatannya sendiri. Maka hati nurani pasti harus dipatuhi. Sebaliknya bagi seseorang yang berhati nurani ragu-ragu, pertama-tama seharusnya ia mencoba mengupas keraguannya. Ia harus merenungkan masalahnya untuk melihat, mengapa ia tidak dapat mencapai suatu kesimpulan yang pasti. Setiap hati nurani yang penuh keraguan dapat dirubah menjadi hati nurani yang pasti. Seseorang tidak perlu terus berada dalam keraguan tentang apa yang harus ia kerjakan.

Akhirnya perlu kita pahami beberapa catatan tentang hati nurani (suara batin):

1. Setiap keputusan memang harus diambil sesuai dengan suara batin.
2. Suara batin harus terus menerus disesuaikan dengan hal yang obyektif. Oleh karena itu wajib memperhatikan semua argumen, unsur, formasi, pertimbangan dan lain-lain pendapat.
3. Suara batin dapat juga keliru. Kemungkinan karena kurang berinformasi atau karena tidak tepat dalam mempertimbangkan semua segi masalahnya.
4. Bertindak dengan suara batin yang salah/keliru, tidak dianggap salah. Tetapi adalah salah apabila sebelum mengambil keputusan tidak mencari semua informasi

yang mungkin.

5. Pada saat pengambilan keputusan, dapat belum sampai pada suatu kepastian pendapat (masih bimbang). Dalam situasi ini bebas memilih apa yang dianggap tepat, walau disadari kemungkinan keliru. (dikutip dari Frans Von Magnis 1979:33).

ALIRAN-ALIRAN PENTING DALAM ETIKA.

ALIRAN ETIKA NATURALISME

Aliran ini menganggap bahwa kebahagiaan manusia didapatkan dengan mengikuti panggilan natur/kodrat manusia. Sistem etika ini menganggap bahwa kesusilaan mempunyai dasar alami. Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kodrat manusia. Kodrat manusia dapat dibedakan atas kodrat lahir dan kodrat batin.

Cara berpikir tentang etika menurut aliran ini adalah: Di dalam dunia ini segala sesuatu menuju satu tujuan. Setiap orang dapat menuju kebahagiaan yang sempurna dengan memenuhi panggilan kodratnya masing-masing. Manusia menuju tujuan itu dengan akalunya.

Kewajiban manusia adalah mencapai kesanggupan akal yang setinggi-tingginya, dan melakukan perbuatan dengan berpedoman pada akal itu. Kodrat manusia adalah mempertahankan kelangsungan hidup. Atas dasar keinginannya untuk kelangsungan hidup, manusia membedakan perbuatan/pekerjaan yang mengganggu atau mempertahankan kelangsungan hidup itu. Kebahagiaan terletak pada tidak terganggunya kelangsungan hidup itu.

Dengan demikian sistem etika ini, memulangkan norma-norma kesusilaan kepada sesuatu yang menggerakkan manusia secara kodrati. Menjabarkan pertimbangan-pertimbangan kesusilaan tentang perilaku dari sesuatu yang menggerakkan manusia secara kodrati.

ALIRAN ETIKA HEDONISME

Hedonisme bertolak dari pendirian bahwa menurut kodratnya manusia mengusahakan kenikmatan. Secara negatif perwujudan kodrat ini terungkap dalam sikap menghindari rasa sakit. Secara positif terlihat dalam sikap mengejar apa saja yang dapat menimbulkan rasa nikmat.

Hedonisme mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah kenikmatan. Segala jalan yang menyampaikan kepadanya adalah berharga (keutamaan). Akal, pengetahuan serta kebijaksanaan dianggap juga sebagai keutamaan, karena merupakan jalan menuju kenikmatan.

Epikuros salah seorang tokoh aliran ini mengatakan bahwa kenikmatan yang dicari adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Sebab kenikmatan itu ada yang menimbulkan rasa sakit. Maka kenikmatan yang diinginkan adalah kenikmatan yang berlangsung lama. Sehubungan dengan ini Epikuros mengelompokkan tiga macam kenikmatan:

- a. Nikmat yang ditimbulkan dari perasaan sewajarnya dan sudah diperlukan sekali, misalnya makan ketika lapar.
- b. Nikmat yang ditimbulkan dari perasaan sewajarnya tapi belum dibutuhkan benar, seperti makanan lezat.
- c. Nikmat yang timbul dari perasaan yang tidak sewajarnya

dan tidak diperlukan, tetapi kenikmatan itu dirasakan oleh manusia atas fikiran yang salah, misalnya kenikmatan akan harta dan kemewahan .

Seorang yang bijaksana hanya akan memperhatikan kenikmatan yang pertama, dan menekan keinginan terhadap kenikmatan yang ketiga. Terhadap kenikmatan yang kedua dia akan mempertimbangkan, dan berusaha agar tidak menjadi kebiasaan.

Hedonisme dibedakan atas hedonisme spritualis dan hedonisme materialis sensualistis; serta hedonisme individual dan hedonisme sosial.

ALIRAN ETIKA EUDEMONISME

Kata "eudemonisme" berasal dari kata Yunani "eudaimonia" yang berarti mujur atau beruntung. Pada mulanya mengacu kepada keadaan lahiriah, tetapi kemudian lebih dititikberatkan pada suasana batiniah. Dengan demikian mempunyai arti "bahagia" (kebahagiaan).

Kata "kebahagiaan" menggambarkan perasaan senang terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan. Perasaan itu timbul karena pengetahuan mengenai penyelarasan diri. Orang yang sudah mencapai tingkatan "eudemonia" mempunyai keinsafan akan kepuasan yang sempurna tidak hanya secara jasmani, melainkan juga secara rohani. Di situlah letak perbedaan yang nyata antara eudemonisme dengan hedonisme.

Pemahaman Aristoteles terhadap "kebahagiaan" lebih

realis dan sederhana dibanding Sokrates dan Plato. Ia menuju kepada kebahagiaan yang tercapai oleh manusia sesuai dengan jenisnya laki-laki atau perempuan, derajatnya, kedudukannya atau pekerjaannya. Tujuan hidup tidaklah mencapai kebaikan untuk kebaikan, melainkan merasai kebahagiaan.

ALIRAN ETIKA UTILITARISME.

Aliran ini dinamakan orang juga "utilisme" yang berasal dari kata "utilis" yang berarti bermanfaat. Utilisme mengatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan ialah manfaat suatu perbuatan. Suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, dan buruk jika membawa mudarat; suatu perbuatan dinilai baik dan buruk juga ditinjau dari besar kecilnya manfaat bagi manusia.

Salah seorang tokoh aliran ini adalah Jeremy Bentham. Ia menyusun suatu etika dengan memakai metode yang murni empirik serta didasarkan pada ilmu jiwa. Menurut Bentham perbuatan manusia digerakkan oleh kemanfaatan atau kerugian, yang menurut dugaannya, disebabkan oleh perbuatan tersebut, pertama-tama bagi dirinya sendiri. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa sesuatu hal bermanfaat jika memberikan kebaikan kepada kita atau menghindarkan kita dari keburukan.

Gagasan yang dikemukakan Bentham bercorak individualis. Sehingga banyak orang yang merasa tidak puas. Maka timbullah utilisme sosial yang mengajarkan: Tidak cukup bila orang seorang bahagia, melainkan setiap orang

harus berbahagia, dan setiap orang harus ikut serta mengujudkannya, dalam arti ikut serta membahagiakan orang lain. Gagasan ini dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill.

ALIRAN ETIKA IDEALISME

Seperti kita ketahui aliran idealisme dalam metafisika berpendirian bahwa wujud yang paling dalam dari kenyataan ialah yang bersifat "kerohanian". Dalam etika aliran idealisme berpendapat bahwa setiap perbuatan manusia haruslah didasarkan pada prinsip kerohanian yang lebih tinggi. Nilai dan harkat manusia didasarkan atas kenyataan bahwa ia merupakan wahana roh dan berkekekatan kejiwaan.

Aliran ini dikelompokkan pada tiga yaitu idealisme rasionalistik, idealisme estetik dan idealisme etik. Pengelompokan ini didasarkan atas perbedaan dalam kemampuan rohani yang diutamakan yaitu : pikiran, perasaan ataukah kehendak.

Idealisme rasionalistik berpendirian bahwa: dengan menggunakan akal dan pikiran, manusia berusaha mengenali norma-norma bagi prilakunya. Dan dengan demikian dapat sampai pada pemahaman tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai akibatnya dapat memahami apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan.

Idealisme estetik, bermaksud hendak mendekatkan

perbuatan susila pada seni; dalam hal ini keinsafan kesusilaan seakan-akan menjadi masalah citarasa. Ciri pengenal estetisme ialah pendiriannya bahwa dunia, kehidupan dan khususnya kehidupan manusia dipandang sebagai karya seni. Tugas manusia adalah membentuk secara selaras suatu kehidupan sebagai karya seni. Bentuk idealisme ini mengusahakan pengujudan diri, penyempurnaan diri, pengembangan bakat serta kemampuan diri, agar dapat memenuhi idaman manusia serba laras, baik dengan diri sendiri maupun dengan dunia.

Idealisme etik bertolak dari kenyataan kesusilaan. Atas dasar tersebut disusunlah pandangannya tentang dunia dan tentang kehidupan. Paham ini mengakui adanya lingkungan norma-norma moral yang berlaku bagi manusia, dan menuntut manusia mewujudkannya. Manusia dipandang sebagai makhluk susila. Artinya sebagai makhluk yang mempunyai keinsafan akan baik dan buruk; dapat mengerjakan yang baik dan tidak mengerjakan yang buruk; namun mengalami juga adanya kekuatan penentang yang besar yang terdapat di dalam atau diluar dirinya, dan sedikit banyak dapat dikalahkannya. Di dalam semuanya itu terletak harkat dan martabat manusia.

Contoh yang paling menonjol dalam aliran ini adalah ajaran Immanuel Kant. Inti ajarannya tentang imperatif kategorik, amar wajib tanpa syarat.

ALIRAN ETIKA VITALISME

Aliran ini dalam menilai baik buruknya perbuatan manusia memakai ukuran ada tidaknya "daya hidup".

Istilah "vita" yang berarti kehidupan mengacu pada suatu etika yang memandang kehidupan sebagai kebaikan tertinggi. Prilaku yang baik adalah prilaku yang menambah daya hidup, sedangkan prilaku yang buruk adalah prilaku yang mengurangi dan merusak daya hidup. Setiap usaha manusia harus ditujukan agar ia dapat hidup; berkehendak untuk hidup; serta melenyapkan hal-hal yang merintangi kemajuan serta perkembangan kehidupan.

Para penganut aliran ini berpendapat adalah lebih aman bagi manusia untuk menelusup ke dalam arus kehidupan, bersatu dengan kehidupan dan semata-mata hidup serta dapat bersetiakawan dengan segala sesuatu yang hidup. Kehidupan dinilai begitu tingginya, sehingga vitalisme berakhir dengan pendewaan terhadap kehidupan.

Tokoh terkenal dalam aliran ini adalah Friedrich Nietzsche. Dalam filsafatnya eksistensi manusia sebagai "ubermensch" yang berkemauan keras menempuh hidup baru yang diciptakannya, dan menghancurkan yang lama.

PENUTUP

Hidup pada hakekatnya adalah karunia dan tanggungjawab. Betapa banyaknya kemungkinan dan alternatif dalam hidup kita, yang menawarkan tantangan untuk menentukan arah dan tujuan kehidupan masing-masing. Setiap manusia yang sadar akan arti tanggungjawab dan karunia hidup ini, seharusnya berusaha dalam berbuat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian kita akan menempatkan hidup dalam kelayakan dan manusiawi.

Kemungkinan-kemungkinan dan alternatif itu tidak mempunyai arti, jika dikerjakan tanpa mempunyai kaitan dengan pengabdian yang semata-mata karena Tuhan. Bagaimana seharusnya kita bertindak, beberapa petunjuk dan pemikiran telah diberikan. Di atas semua itu yang paling penting adalah menetapkan pilihan kita atas dasar iman dan keyakinan. Karena pelaksanaan etika dalam kehidupan berdasarkan totalitas kepribadian kita. Kita berbuat bukan karena terpaksa, dan tidak perlu memaksakan kehendak.

Kesempurnaan hidup dan tindakan kita bukannya tanpa norma. Dengan norma segi-segi tanggungjawab kita menjadi jelas. Kebijaksanaan adalah memahami dan menempatkan diri dalam situasi dengan segenap sikap moral yang terpuji. Dalam arti bertanggungjawab terhadap Tuhan

terhadap diri sendiri, sesama manusia dan alam semesta.

Akhirnya, mampukah kita mempunyai keberanian moral dalam menghadapi akibat apapun dari perbuatan kita yang memilih prinsip-prinsip etika, atas dasar keyakinan kebenaran?

DAFTAR BACAAN

- 1 Ahmad Amin, Prof, Dr, Etika (Ilmu Akhlak), Bulan Bintang, Jakarta.
1986
- 2 Ahmad Ch. Zubair, Drs, Kuliah Etika, Rajawali Pers, Jakarta.
1987
- 3 C.A Van Peursen, Dr, Strategi Kebudayaan, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
1976
- 4 Frans Von Magnis, Dr, Etika Umum, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
1984
- 5 _____, Kuasa dan Moral, Gramedia, Jakarta.
1986
- 6 Hasbullah Bakry, Prof, Drs, Sistematik Filsafat, Widyadjaya, Jakarta.
1980
- 7 H. D. Vos, Dr, Pengantar Etika, Tiara Wacana, Yogyakarta.
1987
- 8 Harsya W. Bachtiar (editor), Percakapan Dengan Sidney Hook, Djambatan, Jakarta.
1980
- 9 Ismail Thaib, Drs, Risalah Akhlak, Bina Usaha, Yogyakarta.
1984
- 10 Louis Leahy, Manusia Sebuah Misteri, Gramedia, Jakarta.
1984
- 11 Muhammad Hatta, Dr, Alam Pikiran Yunani, Tintamas, Jakarta.
1986

- 12 M. Said, Drs, Etik Masyarakat Indonesia, Pradya
1976 Paramita, Jakarta.
- 13 N. Driyarkara, Prof, Dr, Percikan Filsafat, Pempa-
1978 ngunan, Jakarta.
- 14 Poedjawiyatna, Prof, Etika Filsafat Tingkah Laku,
1984 Bina Aksara, Jakarta.
- 15 Sidi Gazalba, Drs, Sistimatika Filsafat, Bulan Bina-
1978 tang, Jakarta.
- 16 Soejono Soemargono, Drs (editor), Berfikir Kefilsa-
1988 fatan, Nurcahaya, Yogyakarta.
- 17 Suprihadi Sastrosupono, Drs, Etika (Sebuah Pengan-
1983 tar), Alumni, Bandung.
- 18 W. Puspoprojo, Dr, Logika Ilmu Menalar, Remaja Kar-
1985 ya, Bandung.
- 19 _____, Filsafat Moral (Kesusilaan Dalam Teori
1986 dan Praktek), Remaja Karya,
Bandung.